

**PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA SUKU DAYAK BEDA AGAMA
DI KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga



Oleh :

ZAIDIN
NIM. 18014075

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 1442 H/2020 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id.
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>.

NOTA DINAS

Judul Tesis : Pembagian Harta Waris Beda Agama Pada Suku Dayak di
Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan

Ditulis Oleh : Zaidin

NIM : 18014075

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada
Program Studi Magister Hukum Keluarga.

Palangka Raya, Oktober 2020
Direktur,

Dr. H. Normuslim, M. Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : Pembagian Harta Waris Beda Agama Pada Suku Dayak di
Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan

Ditulis Oleh : Zaidin

NIM : 18014075


Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN Palangka
Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, Oktober 2020

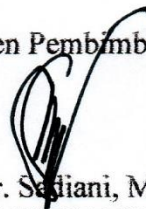
Menyetujui :

Dosen Pembimbing I,



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 1965042919910310002

Dosen Pembimbing II,



Dr. Sadjani, M.H.
NIP. 196501011998031006

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga,



Dr. Elvi Soeradji, M.H.I
NIP. 197207081999031003

PENGESAHAN

Tesis yang Berjudul **PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA SUKU DAYAK BEDA AGAMA DI KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN** Oleh Z Aidin 18014075 telah diujikan oleh Tim Penguji Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 6 Nopember 2020

Palangka Raya, Nopember 2020

Tim Penguji:

1. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Ketua Sidang / Anggota
2. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
Anggota
3. Dr. H. Normuslim, M.Ag
Anggota
4. Dr. Sadiani, MH
Sekretaris/ Anggota

()
()
()
()

Direktur Pascasarjana
IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002

**PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA SUKU DAYAK BEDA AGAMA
DI KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pembagian warisan keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, maka peneliti melakukan penelitian mendalam dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pembagian harta waris beda agama, bagaimana peran tokoh adat dan bagaimana eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan,

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (field research). Dalam menentukan sampling sebagai responden yang berjumlah lima orang ahli waris yaitu; NL, MS, YL, TPW dan RM serta informan Mantir adat RI, UN dan Damang Kepala Adat AR.menggunakan teknik snowball sampling. Adapun proses pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan data collection (pengumpulan data), data reduction (pengurangan data), data display (penyajian data) dan data verification (verifikasi dan penarikan kesimpulan). Selanjutnya dalam pengabsahan data menggunakan teknik Triangulasi.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Proses pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dilakukan dengan cara musyawarah untuk membagikan harta waris kepada seluruh ahli waris. Bagian yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama tanpa membedakan laki-laki atau perempuan dan agama yang diyakini oleh ahli waris. 2. Peran tokoh adat dalam pembagian waris pada keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sangat dominan dengan dibuktikan bahwa pada setiap pembagian harta waris selalu di undang sebagai mediator. 3. Eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan adalah bahwa suku Dayak lebih mengutamakan hukum adat dalam pembagian warisan dibanding hukum agama yang di anut oleh masyarakat dengan anggapan bahwa hukum waris adat merupakan cara pembagian yang bijaksanan karena berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga.

Kata Kunci : *Pembagian Harta Waris dan Beda Agama*

**THE LEGACY DISTRIBUTION OF DAYAK TRIBE FAMILIES
WITH DIFFERENT RELIGION IN SOUTH BARITO REGENCY
AT DUSUN SELATAN DISTRICT**

ABSTRACT

The purpose of this research is motivated by the distribution of the inheritance / legacy of the Dayak ethnic families of different religions in South Barito Regency at Dusun Selatan District, so the researcher conducted in-depth research with the aim of knowing and examining the process of distributing inheritance / legacy with the different religions, the role of traditional leaders and how the existence of customary law in distribution of the inheritance / legacy of the Dayak tribe families with different religions in South Barito Regency at Dusun Selatan district.

The methodology of the research was used field research (*qualitative method*). The researcher has determined the samples of the research with respondents were five heirs, namely; NL, MS, YL, TPW and RM as well as informants of the Indonesian traditional Mantir, UN and a tribal head (*Damang Kepala Adat*) AR using snowball sampling technique. The data collection process was obtained through interviews, observation and documentation. While the data analysis used data collection (data collection), data reduction (data reduction), data display (data presentation) and data verification (verification and drawing conclusions). Furthermore, in validating the data used the Triangulation technique.

The conclusions of this research are: 1. The process of distributing the inheritance / legacy of the Dayak tribe families with different religions in South Barito Regency at Dusun Selatan district is carried out by means of deliberation to distribute inheritance / legacy to all heirs. The discussion given to the heirs is the same regardless of male or female and the religion the heir believes in. 2. The role of traditional leaders in the distribution of inheritance / legacy among Dayak tribe families with different religions in south barito Regency at Dusun Selatan district is very dominant, as evidenced by the fact that every distribution of inheritance is always invited as a mediator. 3. The existence of customary law in the distribution of the inheritance / legacy of the Dayak tribe with different religions in South Barito Regency at Dusun Selatan District is that the Dayak tribe prioritizes customary law in the distribution of inheritance / legacy compared to the religious law that adopted by the community on the assumption that customary inheritance / legacy law is a way of wise discussion because it is based on the deliberation and consensus of families.

Keywords : *The distribution, tribe, inheritance / legacy and different religions.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA SUKU DAYAK BEDA AGAMA DI KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN”** ini dilakukan dalam rangka penyelesaian studi Program Megister Hukum Keluarga sekaligus sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di IAIN Palangka Raya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan peneliti yang masih terbatas. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati , peneliti menerima kritikan dan saran dari berbagai pihakguna kesempurnaan penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti sudah banyak menerima bantuan, baik yang berupa motivasi moril maupun spiritual, bimbingan dan kerjasamanya, sehingga terselesaikannya tesis ini, sebagai rasa hormat dan rendah hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya,
2. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya,

3. Bapak Dr. Elvie Soeradji, M.H.I, selaku ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sadiani, MH selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan selama perkuliahan terutama dalam proses penyelesaian tesis,
5. Segenap civitas akademika yang selalu memberikan kemudahan dalam mengurus segala hal administrasi selama perkuliahan dan pada saat peneliti menyusun tesis ini rampung,
6. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan, membantu, memberikan kesempatan dan pengorbanannya baik *materiil* maupun *immaterial* demi kesuksesan peneliti,
7. Seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian penulisan tesis ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun peneliti harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Semoga dengan terselesainya penyusunan Tesis ini bisa bermanfaat bagi kita semua, Amiin ya rabbal. Alamin, Wa'alaikum salam Wr. Wb.

Palangka Raya, Nopember 2020
Peneliti,

Zaidin
NIM. 18014075

PERNYATAAN ORISINALITAS



Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA SUKU DAYAK BEDA AGAMA DI KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika di kemudian hari adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Nopember 2020
Yang Membuat Pernyataan,


ZAIDIN

NIM : 18014075

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ .

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188)

DAFTAR ISI

Nota Dinas	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Abstrak.....	iv
Abstrac.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Pernyataan Orisinalitas.....	viii
Motto.....	ix
Daftar isi.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar singkatan	xiii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xiv
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Kewarisan Hukum Adat.	9
2. Teori Kewarisan Hukum Islam	16
3. Teori Kewarisan Kristen/ Katholik	29
4. Teori Kewarisan Agama Hindu	31
5. Teori Kewarisan Perdata	32
6. Teori ‘Urf.....	38
7. Teori Musyawarah.....	49
B. Kerangka Pikir.....	54
C. Konsep penelitian.....	54
1. Pembagian.....	55
2. Harta.....	56

3. Waris.....	56
4. Keluarga.....	56
5. Suku Dayak.....	56
6. Beda agama.....	57
D. Penelitian yang Relevan	57
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis, Subjek, Objek, Tempat dan Waktu Penelitian	60
1. Jenis Penelitian.....	60
2. Subjek Penelitian.....	61
3. Objek Penelitian.....	61
4. Waktu Penelitian	62
B. Data dan Sumber Data.....	62
1. Data	62
2. Sumber Data.....	63
C. Pertanyaan Penelitian.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data	65
1. Wawancara.....	66
2. Observasi.....	66
3. Dokumentasi	66
E. Teknik Analisis Data.....	67
F. Pemeriksaan Pengabsahan Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Lokasi dan Responden Penelitian.....	71
1. Gambaran Umum Lokasi	71
a. Geografis.....	71
b. Demografi	74
2. Gambaran Umum Responden.....	76
B. Penyajian Data.....	84
1. Data Responden	84
2. Data Informan.....	91
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISA.....	93
1. Proses Pembagian Harta Waris Keluarga Suku Dayak beda Agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	93
2. Peran Tokoh Adat dalam Pembagian Harta Waris Keluarga Suku Dayak Beda Agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan...	132

3. Eksistensi Hukum Adat Dalam Pembagian Harta Waris Keluarga Suku Dayak Beda Agama di Kecamatan Dusun SelatanKabupaten Barito Selatan.....	134
BAB VI PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Rekomendasi	138
DAFTAR PUSTAKA	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Demografi Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Selatan	70
Tabel 2 : Demograsi Jumlah Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Barito Selatan	68
-------------------------------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

dkk.	: Dan kawan-kawan
h.	: Halaman
Perda	: Peraturan Daerah
BW	: Burgelijk Wetboek/ Hukum Perdata Eropa
QS	: Qur'an Surah
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
Hj	: Hajjah
M	: Muhammad
STAIN	: SekolahTinggi Agama Islam Negeri
HR	: Hadits Riwayat
SWT.	: Subhanahuwata'ala

PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	‘	Komaterbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. KonsonanRangkapkarenaSyaddahditulisrangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Biladimatikanditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutahhidupataudenganharkat, fathah, kasrah, ataudammahditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātulfiṭri</i>
------------	---------	---------------------

D. VokalPendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawumati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. VokalRangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawumati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. VokalPendek yang Berurutandalam Satu Kata dipisahkandenganApostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Biladiikutihuruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Biladiikutihuruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya telah lama menerapkan keberlakuan hukum adat dalam berbagai kehidupan di masyarakat, baik dalam hal perkawinan, masalah perdata, pidana dan hukum waris. Hal ini terjadi setelah seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah memiliki Damang Kepala Adat, yang memiliki kekuasaan sampai ke kecamatan dan tingkatannya yang tertinggi berada ditingkat pusat yang disebut dengan istilah “Kerapatan Adat”, menurut Ketua Kerapatan Adat Dayak Kalimantan Tengah, Yansen Lambung.¹

Berlakunya hukum adat di Kalimantan Tengah sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, sebab sebelum lahirnya hukum positif berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Perdata (KUHP) bila terjadi persoalan dalam masyarakat Dayak dapat diselesaikan melalui Hukum Adat.²

Penerapan hukum adat dengan dihidupkannya Lembaga Kadamangan, Dewan Adat, Kerapatan Adat, Mantir Adat bertujuan untuk memperkaya sekaligus mempertahankan budaya bangsa di tengah kemajuan dan kemajemukan kehidupan moderen saat ini (Yansen Lambung, Ketua Kerapatan Adat Dayak Kalimantan Tengah). Bahkan keberadaannya adalah untuk memperkuat posisi hukum positif itu sendiri, misalnya ada terjadi sengketa tanah adat. Sebelum ditangani oleh pihak kepolisian atau pengadilan, sebaiknya diselesaikan di lembaga adat. Lebih baik lagi

¹Lokakarya Kadamangan se Kalimantan Tengah di Palangka Raya tanggal 18 Oktober 2009

²*Ibid.*

kalau dapat tuntas di tempat itu, sehingga mempermudah suatu persoalan di tengah masyarakat menjadi bisa hidup damai dan tenteram.³

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang juga dikuatkan oleh Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten dan Kota termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedamaian di undangkan untuk melindungi, mempertahankan dan mengembangkan Kedamaian.⁴ Persoalan hukum bagi masyarakat adat sering kali muncul ketika hak-hak yang melekat padanya tidak mampu dilindungi oleh Hukum Negara.

Kesepakatan penerapan Adat tersebut sudah dilakukan sejak lama, agar siapa saja yang berada di Kalimantan Tengah wajib menghargai Hukum Adat di wilayah Kalimantan Tengah. Kerapatan Adat menyidang sengketa Adat termasuk dalam hal pembagian Waris pada anggota keluarga yang berbeda agama yang cukup riskan dalam menjaga serta mengendalikan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi persengketaan yang mengarah pada perselisihan dan perpecahan yang berakibat lunturnya persatuan dan kesatuan.⁵

Penelitian ini terinspirasi dari sebuah pertanyaan salah seorang warga masyarakat Barito Selatan yang datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, menanyakan dengan siapa saya harus berurusan kalau membagi waris sementara saya dan almarhum orang tua saya berbeda agama. Sepengetahuan peneliti bahwa apabila

³*Ibid.*

⁴Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 16 Tahun 2008 dan Perda Kedamaian Kabupaten Barito Selatan No. 6 Tahun 2006 tentang Damang Kepala Adat.

⁵*Ibid*

berbeda agama maka tidak dapat saling mewarisi, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah yang berbunyi sebagai berikut :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ. (رواه البخاري)

Artinya : “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.”.⁶

Atas dasar hadits tersebut, bahwa pembagian waris beda agama secara tekstual tidak dibenarkan, oleh karena itu penulis menyarankan agar orang tersebut menemui dan meminta penjelasan pada Mantir adat atau Damang Kepala Adat setempat.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka penulis melakukan observasi awal dengan mewawancarai para informen yaitu Mantir Adat dan Damang Kepala Adat serta ahli waris yang keluarganya berbeda agama dan telah membagi warisan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat sebagai berikut :

1. Bahwa masyarakat Dayak Dusun Selatan khususnya di desa Kalahien sangat menghargai dan menghormati Mantir Adat dan Damang Kepala Adat yang dibuktikan dengan seringnya mendapat undangan dari para ahli waris untuk menghadiri, menyaksikan proses musyawarah pembagian warisan sekaligus diminta untuk memberikan pencerahan tentang betapa pentingnya menghormati adat dan menjaga keutuhan keluarga meskipun berbeda agama..
2. Bahwa keberadaan Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan sangat dominan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, baik masalah yang berhubungan dengan sengketa tanah, pernikahan, perkelahian maupun pembagian waris. Waris adat adalah mengikuti apa yang telah dilaksanakan

⁶Achmad Sunarto, *Terjemah Shohih Bukhari*, (Semarang CV. Asy Syifa, 1993) , Juz VIII h.610

oleh para leluhur sehingga masyarakat Dayak Dusun Selatan selalu berpegang teguh kepada adat. Adapun praktek pembagian warisnya adalah diawali dengan permohonan oleh salah seorang anggota ahli waris atau para pihak yang berkepentingan, kemudian para pihak berkumpul bersama dan bermusyawarah untuk mufkat disaksikan oleh Mantir Adat dan Damang Kepala Adat yang diawali dengan penasihatn oleh Mantir Adat atau Damang Kepala Adat. Pembagian waris yang berlaku di masyarakat adalah setelah orang tua meninggal dunia. Apabila semua ahli warisnya masih ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak. Dalam adat Dayak Dusun Selatan tidak ada ketentuan khusus tentang bagian-bagian ahli waris, melainkan harta waris dibagi rata, terkecuali ada kesepakatan ingin memberi lebih kepada adik perempuan yang telah merawat dan mengurus orang tua. Adapun mengenai sanksi apabila ada yang melanggar hasil musyawarah, maka akan mendapatkan sanksi baik sanksi sosial maupun sanksi adat.⁷

3. Menurut salah seorang ahli waris yang keluarganya berbeda agama bahwa karena dalam kehidupan kami sangat kuat dipengaruhi oleh adat, maka kami melakukan pembagian waris dihadapan Mantir Adat dan Damang Kepala Adat dengan berpedoman pada asas musyawarah mufakat. Adapun bagian waris yang didapat kami tidak mempermasalahkan yang penting keluarga tetap rukun meskipun berbeda agama.⁸

⁷Observasi awal di Desa Kalahien , sekaligus wawancara singkat dengan Ardianson, SE, Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan pada tanggal 7 Juli 2020 di rumah Damang Kepala Adat.

⁸Observasi awal di Desa Kalahien, sekaligus wawancara singkat dengan Julianto, ahli waris beda agama desa Kalahien pada tanggal 7 Juli 2020 di rumah Damang Kepala Adat.

Pemberlakuan hukum adat dalam hal pembagian harta warisan selalu melibatkan anggota keluarga, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Seluruh keluarga yang berhak mendapatkan warisan akan diberikan bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat tanpa melalui satu perhitungan yang ada, yaitu seluruh ahli waris mendapatkan harta warisan, tanpa mempermasalahkan perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan para ahli waris dan dilebihkan bagi anggota keluarga yang mengurus sipewaris selama ia masih hidup. Hal ini juga mungkin disebabkan system kekerabatan yang cukup kental mewarnai keluarga masyarakat etnik Dayak tersebut yang meskipun kadang-kadang diantara keluarganya memeluk agama lain dari mereka akan tetapi hubungan kekeluargaan tetap tidak terputus selama masih merasakan nafas kehidupan di dunia ini, dengan istilah anak tetap anak, orang tua tetap orang tua.⁹

Berdasarkan kenyataan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tulisan karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS KELUARGA SUKU DAYAK BEDA AGAMA DI KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Pembagian Harta Waris Keluarga Suku Dayak Beda Agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

⁹*Ibid*

1. Bagaimana proses pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan?
2. Bagaimana peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan?
3. Bagaimana eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pembagian waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Khazanah Akademik terkait dengan pembagian waris di masyarakat.
2. Bahan penelitian bagi yang berminat untuk melakukan penelitian yang sejenis.
3. Sumbangan pemikiran khazanah keilmuan sekaligus referensi bagi akademisi atau bagi siapa saja yang berkepentingan.

4. Sebagai Referensi dalam penyelesaian sengketa waris beda agama agar tidak terjadi benturan kebudayaan antara adat, budaya, negara dan agama.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu, sebagai berikut:

- BAB I :** Pendahuluan terdiri dari; Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan Sistematika penulisan.
- BAB II :** Landasan teoritis terdiri dari kerangka teori dan konsep penelitian. Kerangka teori yaitu Teori Kewarisan Hukum Adat, Teori Kewarisan hukum Islam, Teori Kewarisan Perdata dan Teori 'Uruf. Kerangka Pikir, Konsep Penelitian terdiri dari, konsep peran, konsep hukum adat, konsep pembagian warisan dan konsep beda agama, Penelitian yang relevan.
- BAB III :** Metode penelitian terdiri dari, Jenis, Subjek, Objek, Tempat dan Waktu Penelitian.
- BAB IV :** Merupakan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi geografis dan demografi. Gambaran umum Responden. Penyajian data terdiri dari data responden dan data informan.
- BAB V :** Pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari; (1) Proses pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kab. Barito Selatan; (2) Peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda

agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
(3) Eksistensi hukum adat dalam pembagian waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI : Penutup berisikan simpulan dan rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto yang dikutip Sabian, teori dalam banyak literature digunakan para ahli untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis.¹⁰

Teori dalam penelitian ini berfungsi untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, memuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹¹

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Kewarisan Hukum Adat.

a. Hukum Kewarisan Adat

- Menurut Betrand Ter Haar; “Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial dari keturunan-keketurunan.
- Menurut Soepomo; “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹²

Hukum adat waris adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil, yang mana dari

¹⁰Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta Pustaka Pelajar 2014, h.52

¹¹M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994, h.17

¹²*Ibid.*

seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta dimaksud.

- Menurut SoerojoWigjodipoero; “Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immaterial dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹³

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*debble-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik *materiel* maupun *immateriel*).

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurang idengan biaya-biaya waktu pewaris (almarhum) sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut hukum adat, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan,
- b. Garis pokok penggantian.

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada

¹³*Ibid.*

golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris
- e. Dan seterusnya.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

- a. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu seperti masyarakat etnik Dayak di Kalimantan.

Menelaah gambaran di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan hukum waris adat adalah *pertama*, mengenai siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang merupakan ahli waris. *Kedua*-akan ditelaah saat, kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara pengalihan itu dilakukan antara generasi. *Ketiga*, adalah menelaah mengenai apa sajakah yang

menjadi harta warisan itu dan apakah semua harta warisan itu dapat diwariskan kepada ahli waris.

b. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Apabila hukum kewarisan adat dianalisa, maka ditemukan 5 (lima) asas hukum kewarisan adat, yaitu :

1) Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keridhaan Tuhan bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan berebut harta warisan karena perselisihan diantara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.

2) Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak adalah setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggungjawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta

warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggungjawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggungjawabnya.

3) Asaskerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

4) Asasmusyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat adalah para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

5) Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.¹⁴

Adapun hokum adat dalam masyarakat Dayak merupakan suatu bagian yang penting dalam kehidupan untuk terus dilestarikan sebagai peninggalan

¹⁴Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, h.8

leluhur dan harus dipertahankan demi menuju masyarakat yang damai dan sejahtera. Tak terlepas bagi hukum warisnya. Waris menurut hukum adat Dayak adalah suatu pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, baik itu dibagi sebelum maupun sesudah meninggal, meliputi :

a. Sistem pewarisan pada masyarakat Dayak.

Pewarisan atau proses terjadinya warisan dan pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan dengan bagaimana sistem keturunannya.¹⁵ Pada masyarakat Dayak sistem pembagiannya ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris yaitu dengan pemindahan harta dari orang tua, baik ayah dan ibu kepada anak pewaris.

b. Ahli waris dalam waris adat Dayak

Ahli waris dalam hukum kewarisan adat Dayak, baik proses terjadinya warisan maupun pembagian warisan ditentukan oleh bagaimana sistem pewarisan dalam masyarakat yang ditentukan dengan bagaimana sistem keturunannya.¹⁶ Pada masyarakat Dayak sistem pembagian warisan ditentukan dengan garis keturunan sebagai ahli waris. Adapun ahli waris dalam hukum kewarisan adat Dayak adalah janda atau duda dari pewaris dan anak-anakpewaris, sedangkan orang tua atau saudara menjadi ahli waris apabila tidak ada janda atau duda dan anak-anak pewaris.¹⁷

c. Harta warisan dalam masyarakat Dayak.

¹⁵Gusti Huzainah, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alimni), h. 85

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Wawancara dengan Ardianson, Damang Kepala Adat Dusun Selatan, 6 Juli 2020. Pukul 09.00 WIB.

Harta warisan dalam masyarakat adat Dayak dari suku Dayak Dusun adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta bawaan. Sedangkan menurut suku Dayak Manyan harta warisan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta warisan apabila sudah dibagi dan hendak dijual oleh ahli waris, maka ahli waris yang lain harus mengetahui dan apabila mau mengganti maka diserahkan kepada ahli waris tersebut. Jangan sampai harta warisan gugur ketangan orang lain. Kecuali sudah tidak ada lagi yang mau membelinya dari kalangan ahli waris.¹⁸Selain itu, rumah peninggalan pewaris tidak mutlak menjadi hak milik ahli waris yang merawat pewaris. Hal ini kembali kepada kesepakatan para keluarga. Apabila semua merelakan, maka rumah bias diserahkan kepada ahli waris yang merawat pewaris.¹⁹

d. Sistem pembagian waris adat dalam masyarakat Dayak.

Secara garis besar pembagian waris dalam hukum adat Dayak adalah dengan dibagi rata, tidak memandang jenis kelamin dan agama, hanya cara mengatur pembagian warisan saja yang diserahkan kepada anak laki-laki tertua.²⁰

e. Tidak ada halangan bagi ahli waris adat Dayak

Dalam hukum kewarisan adat Dayak tidak ada yang menghalangi anak Untuk warisan baik dari segi agama maupun jenis kelamin. Bagi suku Dayak berbeda agama tidak menjadi penghalang dalam pembagian waris mereka, semua agama dipandang sama dan mereka lebih mengedepankan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Wawancara dengan Rively Igok, Mantir Adat desa Kalahien, 6 Juli 2020. Pukul 10 WIB.

²⁰ *Ibid*.

persaudaraan dan menjaga nasab atau keturunan.

2. Teori Kewarisan Hukum Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.²¹

Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha, dikatakan sebagai tirkah. Jawad Mughniyah mengatakan bahwa tirkah adalah harta peninggalan mayat, yakni segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun utang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha.²²

Tirkah dapat juga diartikan harta yang dimiliki mayat semasa hidupnya, seperti binatang buruan hasil tangkapannya atau utang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah diamati, atau ada seseorang yang dengan suka rela membayar utang-utangnya.. Atau apabila ada orang yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sesudah dia mati, berupa hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya misalnya memotong

²¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* Cet. II. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 33

²² Beni Ahmad Saebani *Fiqh Mawaris*. h. 15

tangan atau kakinya, lalu dikenakan diyat terhadap pelakunya. Semua itu termasuk dalam kategori harta tirkah.²³

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu fara'idh dalam hukum waris Islam adalah pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Adapun tirkah adalah seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang berupa harta benda, utang piutang dan sebagainya.²⁴

a. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an dan hadits Rasulullah Saw.,²⁵ Dasar hukum Al-Qur'an dan hadits dimaksud adalah QS. Annisa ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176, QS. Al Baqarah ayat 180, 233 dan 240. QS. Al Anfal ayat 75. Qs. Al Ahzab ayat 4, 5 dan 6. Serta QS. Ath Thalaq ayat 7.

Sedangkan hadits-hadits Rasulullah Saw., diantaranya:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلِيِّ رَجُلٍ ذَكَرَ. (متفق عليه)

Artinya: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian hadits:

اعط ا بنتي سعد الثلثين وا مهما الثمن. وما بقي فهو لك

Artinya: “Berikanlah dua pertiga untuk dua anak Saad, seperdelapan untuk jandanya dan sisanya adalah untukmu (paman)” (HR. Abu Daud At Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

²³ *Ibid.* h. 16

²⁴ *Ibid*

²⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h.33

Kemudian hadis dari Saad Ibn Abbas, ...

وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّ عَنْهُمْ عَالَةً يَتَفَكَّهُونَ النَّاسَ.
(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: "Sepertiga adalah banyak atau besar (untuk pelaksanaan wasiat) jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak". (HR. Bukhari dan muslim).²⁶

Salah satu metode Ijtihad adalah Ijma (kesepakatan semua ahli hukum) dalam usaha menggali dan merumuskan hukum. Contoh Ijtihad adalah Kompilasi Hukum Islam yang digunakan di Indonesia merupakan Ijma' atau kesepakatan para ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 1988.²⁷

b. Sebab-sebab Kewarisan

Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta warisan mayit ada tiga hal :

- 1) Hubungan nasab (kerabat hakiki) yaitu ayah, ibu, anak-anak dan siapa saja yang bernasab kepada mereka.
- 2) Hubungan nikah yaitu akad pernikahan yang sah antara suami isteri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami-isteri atau berkhawat (tinggal berdua).²⁸
- 3) Salah satu sebab kewarisan adalah hubungan wala', akan tetapi pada masa sekarang tidak terdapat lagi hubungan tersebut.²⁹

²⁶*Ibid.* h. 51

²⁷*Ibid.* h. 52

²⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), Cet Ke-I h. 48

²⁹ Hubungan wala' yang merupakan kerabat hukmi yang juga disebut wala' al-'itqi atau wala' an-ni'mah. Yaitu hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Hukum Islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak

c. Rukun Waris Islam

Rukun waris ada tiga yaitu:

- 1) Muwwaris/pewaris (orang yang member waris), yakni mayat dimana orang lain berhak mewaris dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- 2) Ahli waris (penerima waris), yakni orang berhak mewaris dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- 3) Mauruts (benda yang diwariskan/hartawarisan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti harta, kebun dan sebagainya.³⁰

d. Syarat Waris Islam

Syarat-syarat waris juga ada tiga:

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti; termasuk jumlah bagian masing-masing.³¹

e. Asas-asas hukum waris Islam

meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-isteri).

³⁰Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 45

³¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, h. 131

Asas-asas hukum waris Islam adalah *pertama*, Ijbari yaitu pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. *Kedua*, Asas bilateral yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. *Ketiga*, Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.³² *Keempat*, asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Alquran yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan.³³ *Kelima*, Akibat kematian berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.³⁴

³² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 55

³³ *Ibid.* h. 57

³⁴ *Ibid.* h. 58

f. Penghalang-penghalang Pewarisan

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang telah memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan mahrum.

Para ulama telah sepakat bahwa status seseorang karena berbeda agama, sebab membunuh dan perbudakan merupakan penghalang terjadinya pewarisan,³⁵ hanya mereka berbeda merincikannya.

Hal-hal yang mencegah kewarisan ialah segala sesuatu yang menghalangi seorang ahliwaris untuk mendapatkan hak waris, hal-hal yang mencegah kewarisan tersebut ialah:

1) Hamba sahaya.

Hamba sahaya tidak berhak memperoleh pembagian harta yang ditinggalkan oleh salah seorang kerabatnya yang wafat. Karena, jika ia memperolehnya maka akan diambil oleh tuannya yang nota bene merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan yang wafat.³⁶ Sebagaimana telah diungkapkan para ahli fiqih dalam kaidah yang populer:

الْعَبْدُ وَمَا مَلَكَتْ يَدُهُ لِسَيِّدِهِ

Terjemah: “Hamba sahaya dan apa saja yang dimilikinya menjadi hak milik tuannya”.

³⁵ Hal yang mungkin belum disepakati adalah persoalan sebab berlainan Negara khususnya antara seorang muslim disuatu Negara dengan muslim di Negara lain.

³⁶ Pada zaman sekarang masalah hamba sahaya atau perbudakan sudah tidak ada lagi.

2) Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seseorang membunuh anaknya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

ليس لقاتل ميراث (رواه ابن ماجه)

Terjemah: “Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya”.

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْقَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Terjemah: Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.

3) Perbedaan agama

Para ahli fiqih telah sepakat bahwasanya, berlainan agama antara ahli waris dengan pewaris, merupakan salah satu penghalang dari

beberapa penghalang mewarisi.³⁷ Beda agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan beragama Islam. Misalnya ahli waris beragama Islam muwwarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.³⁸ Dengan demikian, orang kafir tidak bias mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir.

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.³⁹

g. Ketentuan Bagian Ahli Waris

Ketentuan bagian ahli waris dalam hukum waris Islam ialah bagian untuk seorang ahli waris sering tidak tetap, berubah-ubah menurut keadaan ahli waris. Maka, hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dalam membagi harta warisan.

Ketentuan bagian ahli waris khususnya ahli waris dzawil furudl diperoleh dari al Qur'an dan hadits Nabi. Ahli waris dzawil furudl terdiri dari 12 orang yaitu : suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara

³⁷ Tim Penyusun Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Ahkamul Mawarits Fil Fiqhil Islami*, diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Faturrahman, dengan judul *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi, 2004), h. 47

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 116

perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek.⁴⁰

Ketentuan pembagian harta warisan terdapat dalam QS. An Nisa ayat 11, 12 dan 176.

Surat An Nisa ayat 11 berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemah: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagimereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴¹

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan member nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

Lebih dari dua Maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

⁴⁰ H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 42

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Depag RI*, h. 102

Surat An Nisa ayat 12 berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ
وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ مِنَ اللَّهِ ۚ وََاللَّهُ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁴²

Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti, mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka dan berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Surat An Nisa ayat 176 berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ

⁴²Ibid.h. 103

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴³

Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

- 1) Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompok adalah sebagai berikut:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Anak dari anak laki-laki (cuculaki-laki) dan seterusnya ke bawah
 - c) Ayah
 - d) Kakek dari ayah (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas
 - e) Saudara laki-laki kandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Saudara laki-laki seibu

⁴³ *Ibid.* h. 140

- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j) Saudara kandung ayah (selanjutnya disebut paman kandung)
- k) Saudara ayah seapak (selanjutnya disebut paman seayah)
- l) Anak paman kandung
- m) Anak paman seayah

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuannya anak laki-laki dari anak laki-laki (cicit) dan seterusnya ke bawah
 - c) Ibu
 - d) Ibunya ibu
 - e) Ibunya ayah
 - f) Saudari kandung
 - g) Saudari seayah
 - h) Saudari seibu
- 2) Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu:
- a) Perkawinan yang sah (al-musaharah)
 - b) Memerdekakan hamba sahaya (al-wala) atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

Ketentuan pembagian harta yang ditetapkan oleh Alquran (*furudhal-muqaddarah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang mendapat setengah ada lima orang, seorang diantaranya laki-laki dan empat orang lainnya perempuan yaitu suami (apabila isteri yang meninggal tidak meninggalkan anak), anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki (keturunan), saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.
- 2) Ahli waris yang mendapat seperempat harta waris adalah suami (apabila isterinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak), Isteri, baik hanya satu orang atau lebih, jika suami tidak meninggalkan anak.
- 3) Ahli waris yang mendapat seperdelapan harta waris yaitu isteri baik satu atau lebih, jika suaminya meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, atau anak dari anak laki-laki baik anak laki-laki atau perempuan.
- 4) Ahli waris yang mendapat dua pertiga harta waris yaitu dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti, bila anak perempuan lebih dari satu, sedangkan anak laki-laki tidak ada, mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan bapaknya. Kemudian dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih), serta saudara perempuan seapak, dua orang atau lebih.
- 5) Ahli waris yang mendapat sepertiga harta waris yaitu seorang ibu apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari

keturunan anak laki-laki, dan dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu baik laki-laki atau perempuan.

- 6) Ahli waris yang mendapat seperenam harta waris yaitu *pertama*, Ayah bila pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki atau anak perempuan, *kedua*, kakek sah (ayahnya ayah) dan terus keatas apabila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus kebawah. *Ketiga*, Ibu bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki serta bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung seayah atau seibu. *Keempat*, Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan.⁴⁴

3. Teori Kewarisan Kristen/ Katholik

a. Dasar hukum

1. Al Kitab Yesaya ayat 38, yaitu :

Pasal 1: Pada hari-hari itu Hizkia sakit hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amons dan berkata kepada nya: “Beginilah firman TUHAN sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi”.⁴⁵

2. Kitab Hukum Kanonik berbunyi:

Kan. 1299. Pasal 1: Yang dari Hukum kodrati dan hukum kanonik dapat menentukan dengan brbas penggunaan harta bendanya, dapat menyerahkan harta untuk karya-karya saleh, baik lewat hibah maupun lewat wasiat/ waris.

3. Al Kitab Kejadian 15:

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, h. 141-148

⁴⁵ Pemerintah RI. 1974, *Alkitab Terjemahan Baru*. Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia., h. 136.

Pasal 2: Abram menjawab: “Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku mati dengan tidak mempunyai keturunan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.”

Pasal 3: Lagi kata Abram: “Engkau tidak memberikan kepadakuketurunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku.”

Pasal 4: Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, “Dia tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandung, dialah yang akan menjadi ahli warismu.”⁴⁶

b. Pembagian wasiat/ waris.

Dalam Taurat Perjanjian Lama orang Ahli Kitab, di dapatkan pada Kitab Bilangan mengacu pada pemindahan kepemilikan harta mayit kepada ahli waris dalam keluarga Israil, adanya keturunan laki-laki menghalangi anak perempuan mendapatkan harta waris orang tuanya. Ketika tidak ada anak laki-laki barulah harta warisan diberikan pada anak perempuan. Berikut kisah dalam Taurat.⁴⁷ Dalam Bilangan Surat 27:

Pasal 8: Dan kepada orang Israil kamu harus berkata: Apabila seseorang meninggal dengan tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada keturunannya yang perempuan.

Pasal 9: Apabila dia tidak mempunyai keturunan perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki.

Pasal 10: Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki bapaknya.

Pasal 11: Dan apabila bapaknya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara keluarganya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Musa.⁴⁸

⁴⁶Pemerintah RI, 1974. h. 55

⁴⁷<http://novitasuslapa.blogspot.com/2016/03/hukum-waris-menurut-kristen.html>. (diakses pada 03 Juli. Pukul: 18)

⁴⁸Pemerintah RI, 1974. Alkitab Terjemahan Lama. Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. Bilangan: 27. h. 162.

4. Teori Kewarisan Agama Hindu

Dalam Manawa Dharmasastra, disebut akan ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumlahan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan, dan menerima hadiah dari orang-orang saleh.⁴⁹

Jadi dahana adalah harta yang diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah jenis pemberian hadiah. Dan yang dapat melakukan pemberian hadiah/hibah adalah ayah, itupun terbatas pada harta tertentu yang bukan harta pusaka milik bersama. Ibu dan anak tidak berhak memberikan harta keluarga.⁵⁰

Dasar berlakunya pewarisan dengan pembagian harta peninggalan, antara lain sebagai mana diatur dalam Manawa Dharmasastra⁵¹ adalah sebagai berikut:

- a. Setelah kematian seorang bapak, ibu, dan saudara-saudara karena setelah berkumpul, dapat membagi-bagi diantara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi orang tuanya masih ada.
- b. Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai semua harta orang tuanya, sedangkan anak yang lain akan hidup dibawah asuhannya seperti halnya sebagai orang tua masih ada.⁵²

Adapun ketentuan pembagian waris agama Hindu sebagai berikut:

⁴⁹G Pudja dan Sudharta, Tjokorda Rai. 1973. *Manawa Darmasastra*. Surabaya: Pramita. h. 546 .

⁵⁰Hilman Hadi Kusuka. 1991. *Hukum waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. (PT. Citra Aditya Bakti Bandung). h. 154.

⁵¹Ibid. h. 244.

⁵²G Pudja dan Sudharta, Tjokorda Rai. 1973. *Manawa Darmasastra*. Surabaya: Pramita. h. 464

a. Hak waris anak laki-laki purusa.

Anak laki-laki yang statusnya purusa dapat seluruh harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, dan mengelola sepertiga harta guna karya atau due tengah.⁵³

b. Hak waris anak laki-laki bukan purusa, mendapatkan dua pertiga harta guna karya orang tua dibagi antara anak-laki dan anak perempuan, tapi bagian anak perempuan separoh bagian anak laki-laki.⁵⁴

c. Hak Waris Perempuan Hindu. Menerima dua pertiga harta guna karya bersama anak laki-laki bukan purusa. Dan janda mendapatkan satu bagian. Jika tidak mempunyai anak laki-laki maka semua warisan jatuh ke tangan anak perempuan. Tidak mendapatkan warisan jika bertingkah tidak baik dan meninggalkan rumah atau pindah agama.⁵⁵

5. Teori KewarisanPerdata

Kewarisan Perdata (Hukum waris Eropa) yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek atau BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka

⁵³Ni Nengah Budawati, dkk. 2012. Payung Adat untuk Keluarga Bali. (Denpasar: LBH APIK Bali). h. 24

⁵⁴Ni Nengah Budawati, dkk. 2012. h. 25.

⁵⁵Ni Kadek Setyawati. 2017. Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender. Jurnal Penelitian Agama Hindu. Bali. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Vol. 1: No. 2. h. 618.

dengan pihak ketiga.⁵⁶ Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan perdata sebagai berikut :

- a. A.Pitlo mengemukakan Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.⁵⁷
- b. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁵⁸
- c. Vollmar berpendapat, bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang mewariskan kepada para warisnya.⁵⁹

Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.

a. Unsur-unsur Kewarisan Perdata

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :

- 1) Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.

⁵⁶Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), h. 81.

⁵⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistim Hukum Nasional*, (PT. Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 249.

⁵⁸A. Pitlo, *Perdata Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Belanda*, (Jakarta : Intermasa, 1986), h.1.

⁵⁹H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1992) h. 373.

- 2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.

Harta warisan atau nalatenschap, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris.

b. Syarat-syarat terjadinya pewarisan

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

- 1) Untuk terjadinya pewarisan maka pewaris harus sudah meninggal dunia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :
 - a) Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki) yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.
 - b) Mati demi hukum, dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

c. Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- 1) Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.

- 2) Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

d. Cara mendapatkan warisan

Dalam KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan sebuah warisan dari pewaris, yaitu :

- 1) Secara ab intestato (pewarisan menurut UU). Pewarisan menurut Undang-Undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ahli waris menurut Undang-Undang berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :
 - a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
 - b) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
 - c) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
 - d) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya.⁶⁰

⁶⁰Mukhtar Zamzami, *Perempuan & keadilan dalam hukum kewarisan Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2013) h. 49

2) Secara testarmentair atau ahli waris ditunjuk dalam suatu wasiat atau testamen. Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara ab intestato.⁶¹

e. Asas-asas hukum waris perdata

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

- 1) Hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.
- 2) Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seseorang yang meninggal.
- 3) Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris.
- 4) Asas individual, yaitu ahli waris secara perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
- 5) Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu.

⁶¹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), h.85-86.

- 6) Asas penderajaatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.

f. Tidak layak menjadi ahli waris

Terdapat sebab-sebab menurut Undang-Undang ahli waris tidak patut atau onwaardig menerima warisan dari pewaris :

g. Ahli waris yang menurut Undang-Undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan secara ab intestato dalam pasal 838, 839 dan 840 KUH Perdata adalah⁶²:

- a) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b) Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
- c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

h. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut menerima warisan dalam pasal 912 KUH Perdata, ialah :

- 1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh pewaris.

⁶²Oemarsalim, *Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 141.

- b. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- c. Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

6. Teori ‘Urf

Secara etimologi ‘*Urf* berasal dari kata ‘*arafa*, *ya’rifu* sering diartikan dengan al ma’ruuf dengan arti “sesuatu yang dikenal”, atau berarti yang baik. Kalau dikatakan Si Fulan lebih dari yang lain dari segi “*Urf*-nya, maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.⁶³

Sedangkan secara terminologi kata “*urf*” mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal mu’amalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/ tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘*Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.⁶⁴

Kata ‘*Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al ‘aadah (kebiasaan), yaitu :

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”⁶⁵

⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 387

⁶⁴ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 162

⁶⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209

Kata *al-'Aadah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah al Zuhayli berpendapat bahwa '*urf*' mengandung makna: Apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafadz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁶⁶

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁶⁷ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, '*urf*' adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁶⁸

Para ulama '*ushul fiqh*' mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana '*urf*' juga disebut sebagai adat istiadat.⁶⁹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa '*urf*' terdiri dari dua bentuk yaitu, '*urf al qauli*' (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan '*urf al fi'li*' (kebiasaan

⁶⁶Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 829

⁶⁷Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 117

⁶⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123

⁶⁹Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta, IRCiSoD, 2014), h. 152

dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul yang disebut jual-beli muathah.⁷⁰ Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda dikalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.⁷¹

a. Landasan Hukum *'Urf*

Landasan syari'ah berupa Al-Qur'an, Hadits serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan masalah akan diuraikan secara terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan :

1) Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *'urf* disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu :

a) Surah ai-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاعْزِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., h. 391

⁷¹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2004), h. 151

Terjemah“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.⁷²

Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut *ma’ruf* ialah yang dinilai oleh kaum Muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak-watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁷³

- b) Firman Allah SWT dalam Surah Al Maidah ayat 6 yaitu :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غَنَمًا مِّنَ السَّمَاءِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemah “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁷⁴

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syara’ maupun yang lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah SWT Maha Kaya dan Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.⁷⁵

- c) Dalam Surat Al Hajj ayat 78.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur’an, 2008),h.. 176

⁷³Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*...212

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*180

⁷⁵Ahmad Mustafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Juz 6, (Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1946) h. 64-65

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemah: “dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamudalam agama suatu kesempitan.”⁷⁶

Al Haraj pada ayat di atas berarti kesempitan. Dalam hadits Nabi dikatakan bahwa Allah akan menghapuskan kesulitan yang dihadapi oleh hamba-Nya dengan kebesaran-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam hal ibadah maupun bermuamalah.⁷⁷

2) Hadits

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yakni hadits dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud :

فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Terjemah“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah disisi Allah SWT.” (HR.Ahmad)⁷⁸

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik

⁷⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*275

⁷⁷Suhartini, Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang Piutang Jasa (Irutan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.”(Sripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), h. 27.

⁷⁸Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad AhmadHambal*, Jilid V (Bairut: Daar al Kutub, 2000), h. 323

disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹

b. Kaidah-kaidah tentang '*Urf*'

Beberapa kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang '*urf*' (Adat istiadat) umat Islam. Kaidah tersebut dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Adapun kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

“Dan, hukum asal dalam kebiasaan atau adat istiadat adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.”

“yang baik itu menjadi '*urf*' sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.”

c. Macam-macam '*Urf*'

1) Ditinjau dari segi objek, '*urf*' ada dua macam :

- a) '*Urf Qauli*', adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan,⁸⁰ sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang menjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan

⁷⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*....., 212

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 390

“saya beli daging satu kilo gram” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

- b) *‘Urf Fi’li*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.⁸¹ Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.

3) Dari segi lingkupnya, *‘urf* terbagi atas dua macam, yaitu :

- a) *‘Urf ‘Aam*, adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.⁸² Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak jarak tempuh maksimum.
- b) *‘Urf Khash*, adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.⁸³ Misalnya mengadakan acara halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan di negara-negara Islam lain tidak melakukannya.

⁸¹Ibid., hal. 391

⁸²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.....*, 210

⁸³*Ibid.*

4) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf*' dibagi dua macam :

- a) '*Urf Shahih*', adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib.⁸⁴ Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
- b) '*Urf Fasid*', adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁸⁵ Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

d. Syarat '*Urf*'

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut :

⁸⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*..., 123

⁸⁵ *Ibid.*

- 1) '*Urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf*' yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) '*Urf*' berlaku umum artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al Suyuthi mengatakan :
 “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.”⁸⁶
- 3) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan :
 '*Urf*' yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”⁸⁷
- 4) '*Urf*' itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- 5) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan '*urf*' di antaranya adalah :
 “Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada '*urf*’.”⁸⁸

⁸⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2401

⁸⁷*Ibid.*

'*Urf* berbeda dengan *Ijma*' disebabkan karena '*urf* itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedangkan *Ijma*' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para Mujtahidin. Wahbah Al Zuhailly berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan *Ijma*' dibentuk oleh kesepakatan para Mujtahid dari umat Rasulullah SAW setelah wafatnya terhadap suatu masalah. *Ijma*' tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara' yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *Ijma*' dianggap sebagai hujjah yang mengikat."⁸⁹

e. Kedudukan '*Urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan '*urf* shahih sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁹⁰

'*Urf* shahih harus dipelihara oleh seorang Mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang Hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan

⁸⁸ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*.....154-150

⁸⁹ Wahbah al Zuhailly, *Ushul al Fiqh al Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al Fikr, tt), h. 83

⁹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*212

dengan syara', maka wajib diperhatikan.⁹¹ Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut :

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum.”⁹²

‘Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.⁹³

Hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan : “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.”⁹⁴

7. Teori Musyawarah

a. Pengertian

⁹¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*....., 124

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, h.125

⁹⁴ *Ibid.*, h.126

Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu “Syawara” yang berarti berunding atau rembug. Jadi Musyawarah adalah suatu usaha bersama dengan sikap rendah hati, buat memecahkan persoalan atau jalan keluar buat bisa mengambil suatu keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan duniawi. Musyawarah mempunyai tujuan untuk bisa mencapai mufakat atau juga persetujuan.

Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah yaitu bagian dari demokrasi. Jadi, sampai saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Di Indonesia penentuan hasil itu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Kalau tidak ada jalan keluar atau mengalami kebuntuan, maka akan dilaksanakan voting atau juga pemungutan suara.

b. Tujuan Musyawarah

Adapun yang menjadi tujuan dalam bermusyawarah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan kesepakatan bersama, jadi keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan buat melihat masalah dari berbagai sudut pandang jadi keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota musyawarah.

3. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot, karena didalamnya ada pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya.

c. Ciri-ciri Musyawarah

Berikut ini, ada beberapa ciri-ciri dari musyawarah, diantaranya yaitu:

1. Dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama.
2. Hasil keputusan musyawarah bisa diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani.
3. Pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan gak memberatkan anggota musyawarah.
4. Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur.

d. Asas Musyawarah

Musyawarah memiliki asas yang terbagi dalam 3 bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Asas keseimbangan mempunyai kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban, tidak mendahulukan haknya dari pada kewajiban.

2. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas yang digunakan dalam bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah atau persoalan dengan baik guna mendapatkan hasil yang

sering disebut dengan mufakat. Asas ini digunakan untuk mendapatkan mufakat semua anggota yang ada dalam musyawarah harus menyetujui keputusan supaya mendapatkan mufakat.

3. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Asas ini digunakan untuk didasarkan pada aturan hukum dan mempunyai rasa keadilan untuk bersama.

e. Manfaat Musyawarah

Bermusyawarah dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan guna untuk menjaga kebersamaan. Dalam hal ini musyawarah memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Melatih untuk Mengemukakan Pendapat

Dalam sebuah proses musyawarah setiap orang mempunyai ide atau gagasan yang berbeda, yang bisa dikemukakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dibahas. Dengan bermusyawarah, seseorang akan terlatih untuk mengutarakan pendapatnya yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam mencari solusinya dari masalah yang sedang dibahas.

2. Masalah Bisa Segera Terpecahkan

Dengan adanya musyawarah, maka akan didapatkan beberapa jalan alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang merupakan

kepentingan bersama. Pendapat yang beda dari orang lain bisa jadi lebih baik dari pada pendapat kita. Oleh karena itu, dalam bermusyawarah penting sekali untuk mendengarkan pendapat dari orang lain.

3. Keputusan yang Dihasilkan Memiliki Nilai Keadilan

Musyawarah adalah suatu proses mendengarkan pendapat dari orang lain yang nantinya menjadi keputusan yang diambil atas kesepakatan bersama para anggota. Kesepakatan yang dihasilkan dimaksud tentu tidak mengandung unsur paksaan di dalamnya. Jadi, semua anggota bisa melaksanakan hasil dari keputusan dengan penuh tanggung jawab dan juga tanpa ada pemaksaan.

4. Hasil Keputusan yang Diambil Mengutamakan Semua Pihak

Keputusan yang dihasilkan dalam bermusyawarah tidak boleh merugikan salah satu pihak atau anggota dalam musyawarah. Jadi, keputusan itu harus sama-sama menguntungkan supaya nantinya hasil yang diputuskan dalam musyawarah dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh keikhlasan.

5. Dapat Menyatukan Pendapat yang Berbeda

Pendapat dalam bermusyawarah pasti berbeda-beda dan juga akan ditemui dalam musyawarah yang melibatkan orang banyak apalagi yang dibahas menyangkut urusan dan kepentingan bersama. Pendapat-pendapat yang beda ini dikumpulkan, lalu ditelaah secara sama-sama baik dan juga buruknya. Jadi, pada akhirnya dalam pembahasan tersebut akan terpilih satu atau juga lebih hasil yang paling baik.

6. Adanya Kebersamaan

Dengan adanya musyawarah, maka akan mempererat hubungan tali persaudaraan antar sesama anggota. Jadi, setiap orang bertemu dengan beberapa karakter yang berbeda-beda dari para anggotanya.

7. Dapat Mengambil Kesimpulan yang Benar

Hasil keputusan yang diambil dalam musyawarah merupakan keputusan yang dianggap benar dan juga sah. Jadi, hasil tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap anggotanya.

8. Mencari Kebenaran dan Menjaga Diri dari Kekeliruan

Dengan adanya musyawarah, maka semua anggota akan bisa menemukan kebenaran atas suatu masalah yang sedang dibahas demi kepentingan bersama.

9. Menghindari Celaan

Dengan bermusyawarah, kita akan terhindar dari berbagai macam anggapan dan juga celaan orang lain. Karena, semua hasil dan juga proses musyawarah di bicarakan bersama dan juga ditelaah oleh seluruh anggota.

10. Terciptanya Stabilitas Emosi

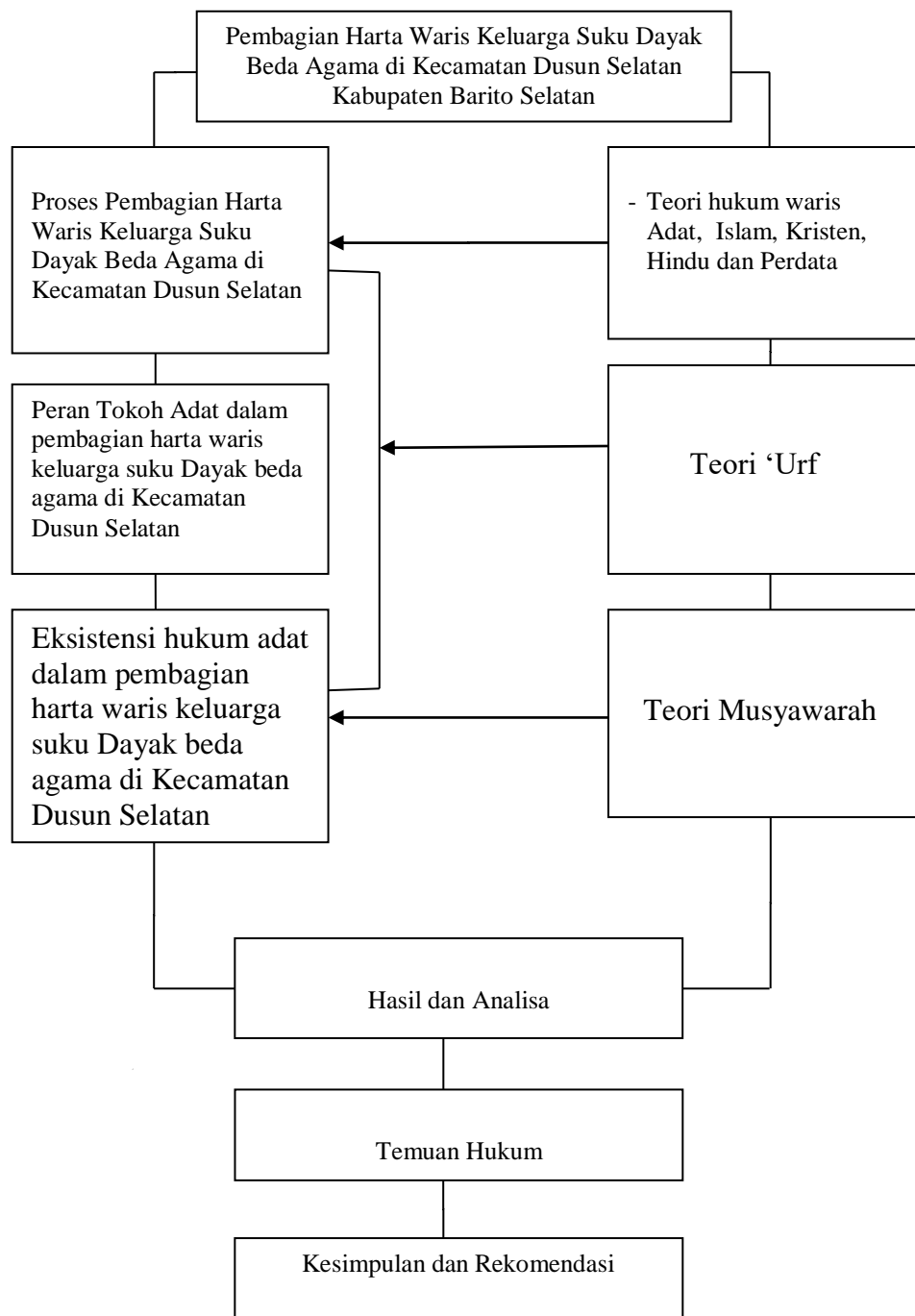
Setiap saat bermusyawarah, pasti semua peserta akan menemukan pendapat yang berbeda-beda dari yang kita sampaikan. Makanya, hal tersebut akan melatih diri kita supaya bisa memahami dan menahan emosi dengan cara menghargai segala macam pendapat orang lain

dalam musyawarah, jadi membuat emosi antar anggota juga tetap stabil.

8. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan berawal dari adanya beberapa praktik pembagian waris beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat Dayak pada Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

Adapun desain penelitian merupakan gambaran proses penelitian secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap terhadap penelitian yang akan penulis sajikan dalam bentuk bagan berikut ini :



9. Konsep penelitian

1. Pembagian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembagian memiliki 2 arti, yaitu pembagian berasal dari kata dasar bagi. Pembagian adalah sebuah

homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan sama tapi maknanya berbeda. Pembagian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembagian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁹⁵

2. Harta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, harta adalah barang atau uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.⁹⁶

3. Waris

Waris merupakan segala sesuatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris, bisa berupa asset dan bisa juga berupa hutang.⁹⁷ Warisan yang dimaksud oleh penulis disini adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua yang berbeda agama dengan ahli waris.

4. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam arti saling ketergantungan.⁹⁸

5. Suku Dayak

Suku Dayak adalah nama yang oleh penjajah diberi kepada penghuni pedalaman pulau Borneo yang mendiami pulau Kalimantan, Brunei, Malaysia yang terdiri dari Sabah dan Serawak, serta Indonesia yang terdiri dari

⁹⁵<https://kbbi.web.id/pembagian.html>

⁹⁶<http://kbbi.web.id/harta.html>

⁹⁷<https://goo.gl/x2lsvz>

⁹⁸Sugeng Iwan, *Pengasuh Anak Dalam Keluarga*. (WIKIPEDIA)

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan.⁹⁹

6. Beda agama

Dalam hukum Islam, beda agama menjadi salah satu alasan seseorang menjadi terhibat atau terdinding untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, saudara beda agama tersebut tetap berhak mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu bagian yang disebut wasiat wajibah. Jadi beda agama yang dimaksud penulis disini adalah keluarga yang terdiri dari multia agama.

7. Penelitian yang Relevan

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan peneliti hanya sedikit yang mengkaji tentang Eksistensi Hukum Adat dalam Praktek Pembagian Waris Beda Agama di Masyarakat Dayak Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

- a. Taufikurrahman, tesis dengan judul *Wasiat Wajibah bagi ahli waris non Muslim*. Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2001 dengan hasil penelitian :

Bagaimana dasar Al Quran dan hadits tentang waris beda agama, apakah alasan yang membolehkan waris bagi non muslim. Ulama yang membolehkan waris beda agama adalah bukan merupakan perbedaan agama

⁹⁹Suku Dayak. WIKIPEDIA.id.m.wikipedia.org

melainkan perbedaan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi antara komunitas muslim dan non muslim dan pandangan hermeneutic mereka adalah merupakan upaya ijtihadi yang perlu diapresiasi karena keinginan mereka mengakomodasi non muslim dengan pandangan bahwa wasiat wajibah adalah solusi bagi waris beda agama, karena wasiat diberikan tanpa persyaratan sekte agama tetapi dia lebih mendahulukan kepentingan keluarga yang tidak mendapatkan kewarisan.

- b. Ahmad Soni Irawan, tesis *Analisis Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Maqaashid Al Syariah Jasser Hudu (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)*. Program Pascasarjana Al Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019.
- c. Hj. Mardiana, tesis *Harta perpantangan sebagai Hukum Adat yang berkembang di Kalimantan Selatan dalam penerapan hukum positif kewarisan Islam*. Program Pascasarjan IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2001.
- d. Nadya Fadillah Utami, tesis *Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Waris Beda Agama di Hubungan Dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Program Pascasarjana Universitas Pasundan pada tahun 2017.
- e. Budiman, Rahmat, Agus Sudaryanto, tesis *Eksistensi Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Banjar Muslim di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*. Program Pascasarjana UGM pada tahun 2009.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, belum ada peneliti yang membahas tentang Pembagian Harta Waris Keluarga Suku Dayak Beda Agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field risechh*) pada Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang membahas bagaimana proses pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama, bagaimana peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama dan bagaimana eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Subjek, Objek, Tempat dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat atau bentuk kaidah sosial, etika berperilaku, peraturan, undang-undang kebijakan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya dan orang lain, dan perilaku atau tingkah polah lainnya yang juga merupakan kajian sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat atau perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diungkap situasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif analisis yaitu mengungkap hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan. yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *snowball sampling* atau bola salju yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar sosiogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penulisan sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga berbeda keyakinan
- b. Terjadi permasalahan pembagian waris beda agama
- c. Pewaris dengan ahli waris berbeda keyakinan atau agama
- d. Pewaris telah meninggal dunia
- e. Ada harta yang diwariskan
- f. Berdomisili di wilayah Kecamatan Dusun Selatan.

3. Objek Penelitian

Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama, peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga beda agama dan eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama.

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah.

Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Subjek yang akan diteliti terdapat di daerah tersebut.
- 2) Sepanjang pengamatan peneliti topic tersebut belum pernah diteliti
- 3) Tradisi adat sangat kental mempengaruhi tata kehidupan masyarakatnya
- 4) Jumlah penduduk beragam dari segi agama di lokasi penelitian tersebut.

4. Waktu Penelitian

Penelitian tentang pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan ini (dua) bulan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 20 September 2020. Waktu tersebut dilakukan untuk menggali data di lokasi penelitian. Apabila data yang diperoleh dipandang cukup, maka penelitian akan dihentikan dan selanjutnya penulis menyusun data tersebut ke dalam sebuah tesis yang seterusnya dikonsultasikan kepada pembimbing.

5. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah informasi atau keterangan yang berkaitan dengan tujuan/objek penelitian dan data yang sesuai dengan focus penelitian, yaitu tentang pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau ucapan lisan dan perilaku subjek (responden). Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, rekaman, gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu, peneliti juga mencari data tambahan dari sumber-sumber tertulis, catatan-catatan, buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Dalam pelaksanaan teknik penggunaan data primer, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* atau bola salju. Orang pertama yang dipilih sebagai *key informan* ini dipandang lebih banyak mengetahui tentang adat istiadat setempat khususnya adat Dayak yang ada di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan adalah Mantir Adat dan Damang Kepala Adat.

Pertama kali peneliti mencari informasi dengan Damang Kepala Adat tentang keluarga suku Dayak beda agama yang telah membagi harta warisan. Peneliti mendapatkan informasi ada satu keluarga kemudian melakukan wawancara. Setelah mendapatkan informasi, peneliti bertanya kepada keluarga tersebut apakah mempunyai keluarga atau teman yang membagi harta waris beda agama juga, setelah mendapatkan informasi lalu melakukan wawancara tentang pembagian harta waris beda agama dan seterusnya sampai kepada titik jenuh.

2. Sumber Data

- a. Data Primer langsung diperoleh dari sumbernya yaitu Mantir Adat, Damang Kepala Adat dan ahli waris yang keluarganya berbeda agama, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

- b. Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi: (1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian; (3) Bahan hukum tertier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan surat kabar.

Secara garis besar data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a) Identitas responden dan informan (nama, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan, status dalam keluarga, alamat)
- b) Hukum yang digunakan dalam pembagian warisan
- c) Tata cara pembagian warisan.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Responden yaitu anggota keluarga beda agama yang mendapatkan hartawarisan.
- b) Informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui masalah pembagian warisan beda agama tersebut atau orang yang mengetahui tentang hukum adat Dayak, yaitu tokoh adat Dayak setempat seperti Mantir Adat dan Damang Kepala Adat.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Proses pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.
 - a. Siapa yang bermohon dalam pembagian harta waris?
 - b. Siapa saja yang menghadiri pada saat pembagian harta waris?
 - c. Bagaimana cara pembagian harta waris?
2. Peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.
 - a. Apa peran tokoh adat dalam pembagian harta waris?
 - b. Bagaimana ahli waris memposisikan tokoh adat pada saat pembagian warisan?
 - c. Adakah solusi dari adat terhadap ahli waris yang melanggar hasil kesepakatan?
3. Eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.
 - a. Apa aturan yuridis yang digunakan dalam pembagian harta waris?
 - b. Seberapa kuatnya aturan yuridis itu mengikat masyarakat adat?
 - c. Apakah ada sanksi hukum terhadap ahli waris yang melanggar kesepakatan adat?

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik ini merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan antara peneliti dengan responden dan informan secara langsung di objek penelitian seperti ahli waris yang keluarganya berbeda agama, Mantir Adat dan Damang Kepala Adat untuk mendapatkan informasi data tentang latar belakang pembagian waris adat, keluarga yang ahli warisnya berbeda agama, berapa bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris, hukum apa yang dijadikan dasar. Peneliti mengadakan Tanya jawab langsung di lapangan dengan responden dan informan untuk menggali data yang diperlukan dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi

Peneliti mengadakan observasi langsung di lapangan untuk memperoleh informasi tentang jumlah sampel yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam observasi terdiri dari dua cara yaitu:

- Dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung (*direct observation*), dengan cara ini penelitian menjadi terfokus, dan sistematis kelokasi penelitian yakni pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.

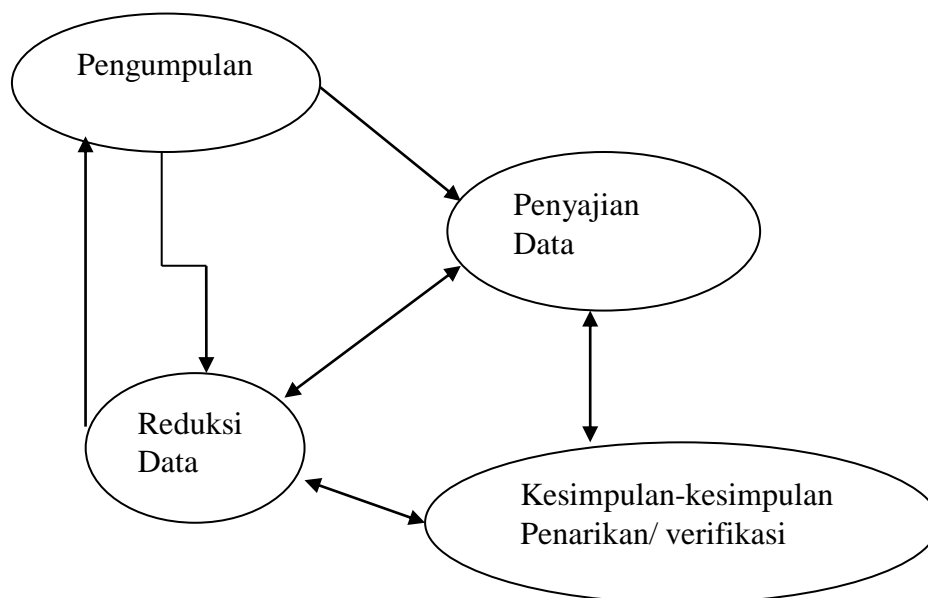
3. Dokumenter

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data-data tentang ahli waris beda agama melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang hendak diteliti terutama dalam hal data penunjang.

E. Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja bersama data, mengorganisasikan data, memilih data dan menjadi satuan yang dapat dikelola.¹⁰⁰ Adapun analisa data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang disebutkan Miles dan Huberman dan dikutip oleh Ulber Silalahi¹⁰¹ terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan /verifikasi dimana sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data, berikut skema dan penjelasannya.

Skema 1. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif



1. *Data Collection* (Pengumpulan data), adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama, peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga beda agama dan eksistensi hukum

¹⁰⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ..., h.274

¹⁰¹ Matthew Miles dan Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, h. 20 dikutip oleh Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Rafika Aditama, 2012, h. 340

adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, kemudian dapat diolah menjadi bahan penelitian.

2. *Data Reduction* (Pengurangan data), adalah data yang diperoleh dari penelitian tentang proses pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama, peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama dan eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, setelah didapatkan seluruh data sesuai keadaan sebenarnya, serta memilih data yang *relevan* dan *tidak relevan* untuk kemudian dimasukkan dalam pembahasan.
3. *Data Display* (Penyajian data), adalah perolehan data dari penelitian tentang proses pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama, peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama dan eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, akan disajikan secara ilmiah tanpa ada penambahan dan pengurangan sedikitpun dari peneliti.
4. *Data Verifikation* (verifikasi dan penarikan kesimpulan), adalah aktivitas yang memperhatikan kembali pada data reduction (pengurangan data), dan data display (penyajian data) sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini tidak mengalami kekeliruan dari data yang telah dianalisis.¹⁰²

¹⁰²*Ibid*, h. 339-341

F. Pemeriksaan Pengabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sesuatu di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.¹⁰³ Adapun dua teknik triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Berikut penjelasan beserta skemanya :

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti relevan dengan sesungguhnya yang ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi, hal ini peneliti lakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian yang diteliti sehingga tidak perlu diragukan lagi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik- teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.¹⁰⁴

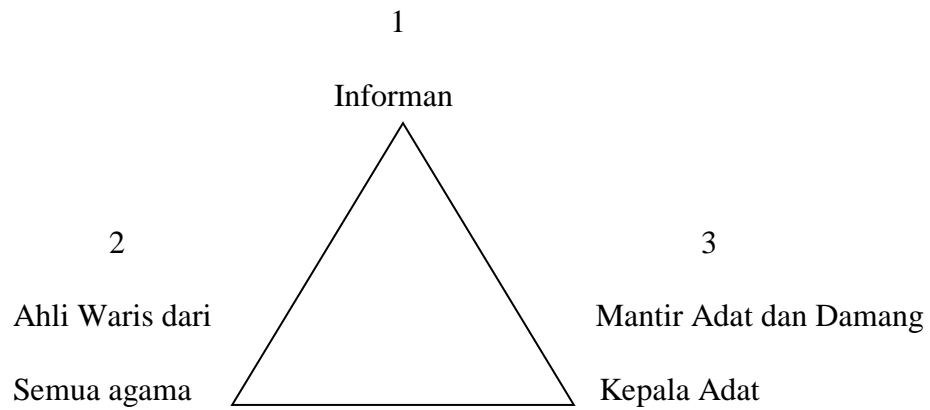
Teknik triangulasi yang di gunakanoleh peneliti adalahTriangulasiSumber yaitu digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis

¹⁰³Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 330

¹⁰⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Remaja Rosdakarya, 2004, h.332.

oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.¹⁰⁵

Adapun yang peneliti maksud sebagai triangulasi sumber disini adalah sebagai berikut :



¹⁰⁵ Ibid Sugiono, *Metode Penelitian*h. 274

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Responden Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi

a. Geografis

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Barito Selatan dengan lebih spesifik wilayahnya pada Kecamatan Dusun Selatan sekaligus merupakan tempat ibu kota Kabupaten Barito Selatan.

Kabupaten Barito Selatan atau dikenal dengan sebutan “Kota Batuah” adalah nama resmi daerah ini setelah terbentuk menjadi daerah Kabupaten otonom sejak 21 September 1959 dengan Buntok sebagai ibu kota Kabupatennya. Sebelumnya, daerah ini dikenal dengan nama Barito Hilir dengan luas 8.830 km² sepanjang kiri kanan aliran sungai Barito. Aksesibilitas utama masyarakat adalah melalui sungai Barito sebagai bagian wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang panjangnya 900 km dan lebar 500 meter serta dapat dilayari sepanjang 700 km, selanjutnya jalan darat dari Palangka Raya ke Buntok sepanjang 198 km. Barito Selatan adalah daerah yang memiliki hak otonomi dan merupakan salah satu Kabupaten induk tertua di wilayah Barito yang dikepalai oleh seorang Bupati.

Kabupaten Barito Selatan terdiri dari enam Kecamatan yang sekarang mempunyai luas wilayah seluas 8.830 km² dengan pembagian sebagai berikut; Jenamas 708 km² (8,02 %), Dusun Hilir 2.065 km² (23,39 %), Karau Kuala 1.099 km² (12,45 %), Dusun Selatan 1.829 km² (20,71 %), Dusun Utara 1,196 km²

(13,54 %), dan Gunung Bintang Awai 1.933 km² (21,89 %) terdiri dari 86 desa dan 7 kelurahan (93 desa/kelurahan) dengan jumlah penduduk 127.524 jiwa (setelah pemekaran Kabupaten Barito Timur). Keberagaman adat istiadat masyarakat yang bertempat tinggal di Barito Selatan terdiri dari suku Dayak (Dusun, Ma'anyan, Bakumpai, Taboyan, Lawangan, Bawo dan Ngaju), serta suku pendatang telah dapat memberikan warna kepada perkembangan kehidupan dan pembangunan di Barito Selatan yang bertetangga dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

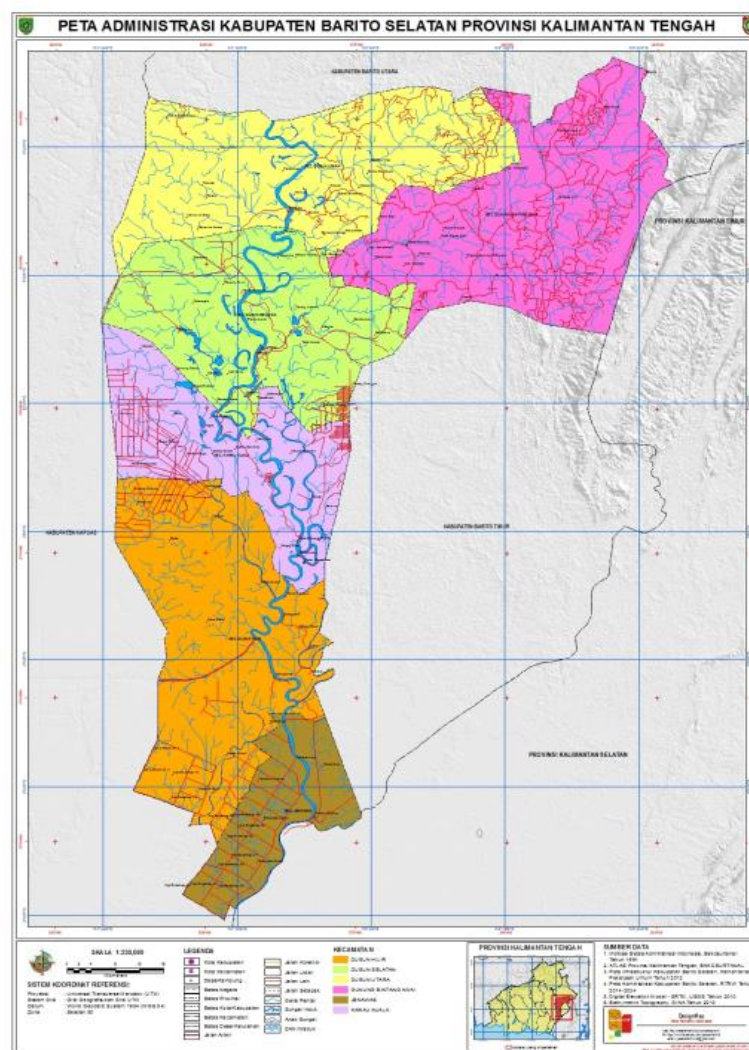
Kabupaten Barito Selatan secara geografis terletak antara 1⁰20' Lintang Utara - 2⁰35' Lintang Selatan dan 114⁰- 115⁰Bujur Timur. Sebagian besar letak kecamatan berada di pinggiran aliran sungai Barito. Oleh karena itu pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan digenangi air kecuali Kecamatan Gunung Bintang Awai karena letak wilayahnya tertinggi dan berada di pegunungan. Kabupaten Barito Selatan berbatasan dengan kabupaten lain yaitu:

- a. Sebelah Utara; Berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara.
- b. Sebelah Timur; Berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur
- c. Sebelah Selatan; Berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala (Prov. Kalsel)
- d. Sebelah Barat; Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas

Keadaan wilayah Kecamatan Dusun Selatan terdiri dari dataran rendah, rawa, hutan dan lembah-lembah dengan mata pencaharian penduduknya adalah pedagang, pegawai, buruh, penyadap karet, bertani, berkebun, pencari ikan, berburu, dan memotong rotan (*memagat paikat*). Adapun nama-nama desa dan

kelurahan pada Kecamatan Dusun Selatan adalah Desa Baru, Kelurahan Buntok Kota, Desa Danau Ganting, Desa Danau Masura, Desa Danau Sadar, Desa Dangka, Kelurahan Hilir Sper, Desa Jelapat, Desa Kalahien, Desa Lembeng, Desa Mabuan, Desa Madara, Desa Mangaris, Desa Muara Ripung, Desa Muara Talang, Desa Murung Paken, Desa Pamait, Desa Pamangka, Desa Pararapak, Desa Penda Asam, Desa Sababilah, Desa Sanggu, Desa Tanjung Jawa, Desa Telang Andrau, Desa teluk mampun, Desa Teluk Telaga dan desa Tetei Lanan.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Barito Selatan



Sumber:<http://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/15/administrasi-kabupaten-barito-selatan/>

Keadaan iklim Kecamatan Dusun Selatan bersifat tropis. Hal ini disebabkan angin dari Barat timbul karena tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia, dan mengakibatkan terjadinya musim penghujan. Kemudian tekanan tinggi di Australia pada musim dingin menyebabkan angin bertiup dari arah timur sehingga mengakibatkan musim kemarau.

b. Demografi

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan sebanyak 136.267 jiwa, terdiri dari 69.966 laki-laki dan 66.301 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Dusun Selatan dengan 42.43 persen, secara lengkap dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.
Data Penduduk Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jenamas	4.599	4.448	9.047
2.	Dusun Hilir	8.437	7.835	16.272
3.	Karau Kuala	8.096	7.736	15.832
4.	Dusun Utara	9.205	8.571	17.776
5.	Gunung Bintang Awai	10.125	9.390	19.515
6.	Dusun Selatan	29.504	28.321	57.825

Sumber, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019.

2) Jumlah Umat Beragama

Berdasarkan data proyeksi penduduk umat beragama di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 berjumlah 136.267 umat beragama. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010 – 2020 diperoleh data umat beragama di Kecamatan Dusun Selatan tahun 2019 berjumlah 57.825 umat beragama.

Tabel 2:
Data Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan Se Barito Selatan.

Kecamatan	Islam	Protes- tan	Kato- Lik	Hindu	Budha	Khong hucu	Lain nya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jenamas	9.035	8	0	4	0	0	0	9.047
Dusun Hilir	14.60 9	1.560	9	92	0	2	0	16.272
Karau Kuala	13.79 4	1.588	236	214	0	0	0	15.832
Dusun Selatan	40.75 4	11.242	3.184	2.636	6	0	3	57.825
Dusun Utara	8.447	5.639	2.714	972	0	4	0	17.776
Gunung Bintang Awai	9.334	5.793	3.344	1.043	0	1	0	19.515
Jumlah	95.97 3	25.830	9.487	4.961	6	7	3	136.267

Sumber, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barsel Tahun 2019.

2. Gambaran Umum Responden

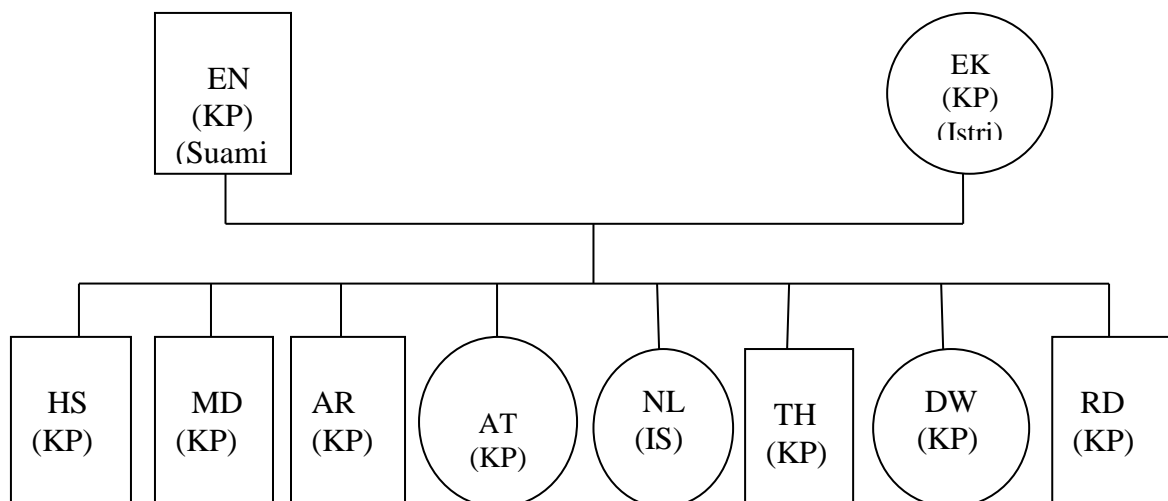
Pada penelitian ini peneliti menyajikan lima responden tentang pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Gambaran responden tersebut adalah sebagai berikut:

Responden I

a. Identitas Responden

Nama NL, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, status dalam keluarga anak kelima, alamat Jl. Pelita Raya Kelurahan Hilir Siper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian Responden



Keterangan Gambar:

KP = Kristen Protestan

IS = Islam

EN = Ester Nangas

EK = Erika

HS	= Helsingki
MD	= Muliadi
AR	= Ariano
AT	= Ariati
NL	= Norlaili
TH	= Tuah
DW	= Dewi
RD	= Ridha

NL adalah anak kelima dari keluarga pasangan EN (suami) dan EK (istri). NL mempunyai tujuh orang saudara yaitu HS anak pertama berjenis kelamin laki-laki, MD anak kedua berjenis kelamin laki-laki, AR anak ketiga berjenis kelamin laki-laki, AT anak keempat berjenis kelamin perempuan, TH anak keenam berjenis kelamin laki-laki, DW anak ketujuh berjenis kelamin perempuan dan RD anak kedelapan berjenis kelamin laki-laki.

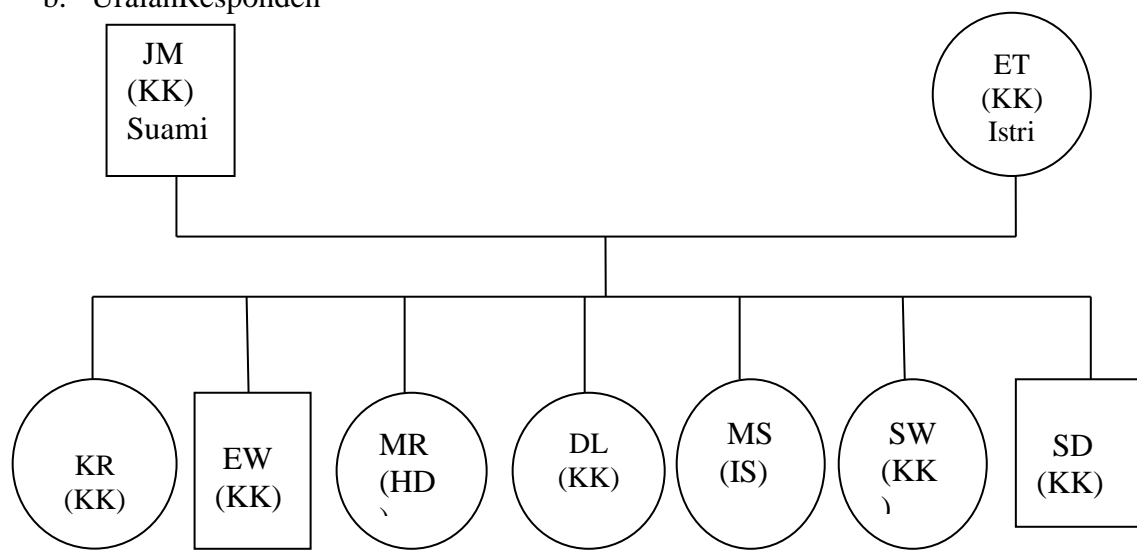
Pada mulanya seluruh keluarga ini beragama Kristen Protestan, akan tetapi setelah NR menikah dengan laki-laki muslim dia berpindah agama karena dia mengikuti agama suaminya yaitu agama Islam.

Responden II

a. Identitas Responden

Nama MS, umur 65 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan terakhir SLTA, status dalam keluarga adalah anak kelima, alamat Jalan Kaladan Kelurahan Hilir Siper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian Responden



Keterangangambar:

KK = Kristen Katholik

IS = Islam

HD = Hindu

JM = Juli Majad

ET = Ester

KR = Kurnice

EW = Erwin

MR = Mariani

DL = Delly

MS = Marisuni

SW = Suwati

SD = Suadi

MS adalah anak kelima dari keluarga pasangan JM (suami) dan istrinya S (almarhumah). MS mempunyai lima orang saudara, dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, yaitu KR anak pertama berjenis kelamin perempuan, EW anak

kedua berjenis kelamin laki-laki, MR anak ketiga berjenis kelamin perempuan, DL anak keempat berjenis kelamin perempuan, SW anak keenam berjenis kelamin perempuan dan SD anak ketujuh berjenis kelamin laki-laki.

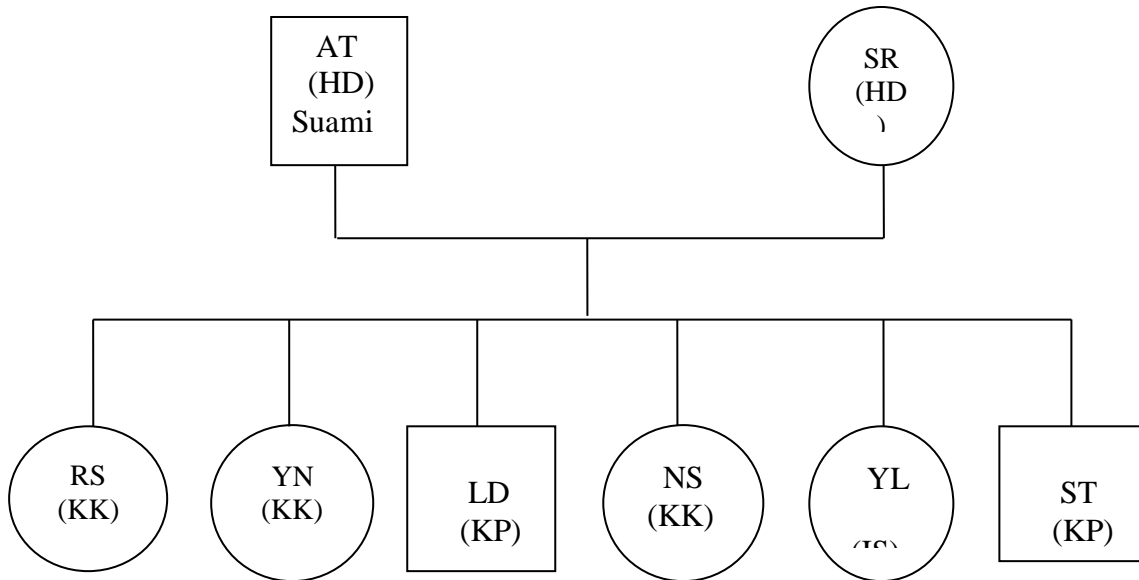
Pada mulanya seluruh keluarga ini beragama Kristen Katholik, akan tetapi Mariani mendapat jodoh laki-laki yang beragama Hindu maka mengikuti suaminya. Sedangkan MS pada saat masih sekolah di SMA dia mendapatkan hidayah untuk masuk Islam karena pengaruh kawan-kawannya yang juga sekolah di SMA tersebut. Pada awalnya keluarganya menentang keras perpindahan agama yang dilakukan MR dan MS sehingga sampai-sampai orang tua ingin tidak mengakuinya sebagai anak. Setelah beberapa bulan kemudian, keluarganya memahami hak azasi yang dimiliki MR dan MS yang tetap berkeinginan memeluk agama Hindu dan agama Islam. Orang tuanya menyadari bahwa anak tetaplah sebagai anak meskipun keyakinannya berbeda.

Responden III

a. Identitas Responden

Responden, Nama YL, umun 58 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir SLTA, status dalam keluarga adalah anak kelima, alamat Jl. Pelita Raya kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian Responden



Keterangangambar:

HD = Hindu

KK = Kristen Katholik

KP = Kristen Protestan

IS = Islam

RS = Rusmiah

YN = Yunio

LD = Liwardi

NS = Ningsih

YL = Yulisa

ST = Sidharta

YL adalah anak kelima dari pasangan AT dan SR (Almarhumah). YL mempunyai lima orang saudara, dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Saudara-saudaranya adalah RS anak pertama berjenis kelamin perempuan, YN anak kedua berjenis kelamin perempuan, LD anak ketiga berjenis kelamin laki-

laki, NS anak keempat berjenis kelamin perempuan dan ST anak keenam berjenis kelamin laki-laki.

Pada mulanya seluruh anggota keluarga ini beragama Hindu, akan tetapi karena perkawinan, semua anggota keluarga berpindah agama yaitu RS yang menikah dengan laki-laki yang beragama Kristen Katholik, YN yang menikah dengan laki-laki yang beragama Kristen Katholik, LD menikah dengan perempuan yang beragama Kristen Protestan, NS menikah dengan laki-laki yang beragama Kristen Katholik, YL menikah dengan laki-laki yang beragama Islam dan ST menikah dengan perempuan yang beragama Kristen Protestan. Dengan demikian terjadilah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.

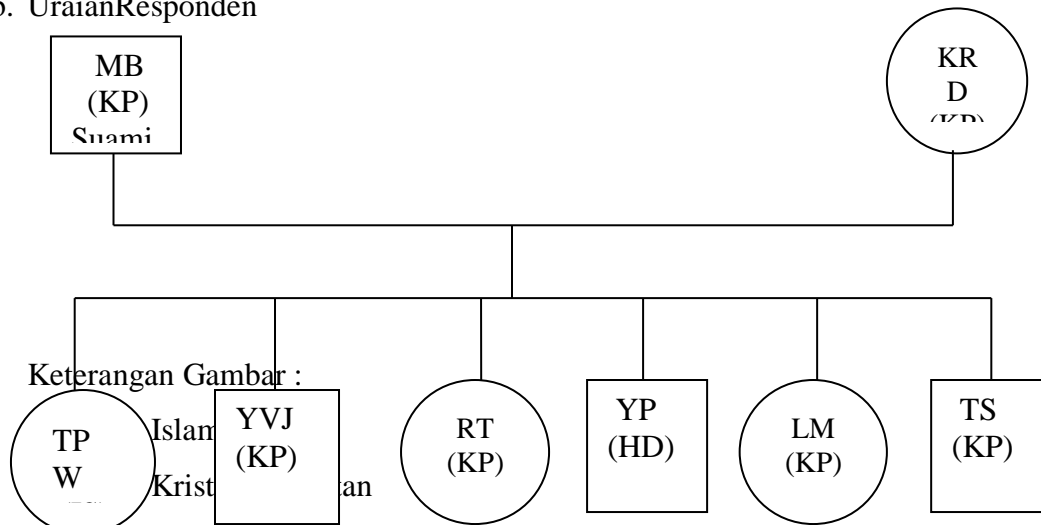
Pada tahun 2014 AT meninggal dunia tidak meninggalkan istri karena istrinya sudah lebih dahulu meninggal dunia. Dia meninggalkan enam orang anak.

Responden IV

a. Identitas Responden

Nama TPW, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, status dalam keluarga anak kesatu, alamat kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian Responden



HD = Hindu

TPW = Tri Prayawati. W

YVJ = Yudi Vitra Jaya

RT = Ria Tapihartini

YP = Yuspirmana

LM = Lina Mardieni

TS = Tulus Setiawan

TPW adalah anak kesatu dari keluarga pasangan MB dan KRD. TPW mempunyai lima orang saudara yaitu YVJ (almarhum) berjenis kelamin laki-laki, RT berjenis kelamin perempuan, YP (almarhum) berjenis kelamin laki-laki, LM berjenis kelamin perempuan dan TS berjenis kelamin laki-laki. Pada awalnya semua anggota keluarga ini beragama Kristen Protestan, akan tetapi TPW menikah dengan laki-laki beragama Islam dan YP (alm) menikah dengan perempuan yang beragama Hindu. Sehingga terjadilah perbedaan agama diantara mereka.

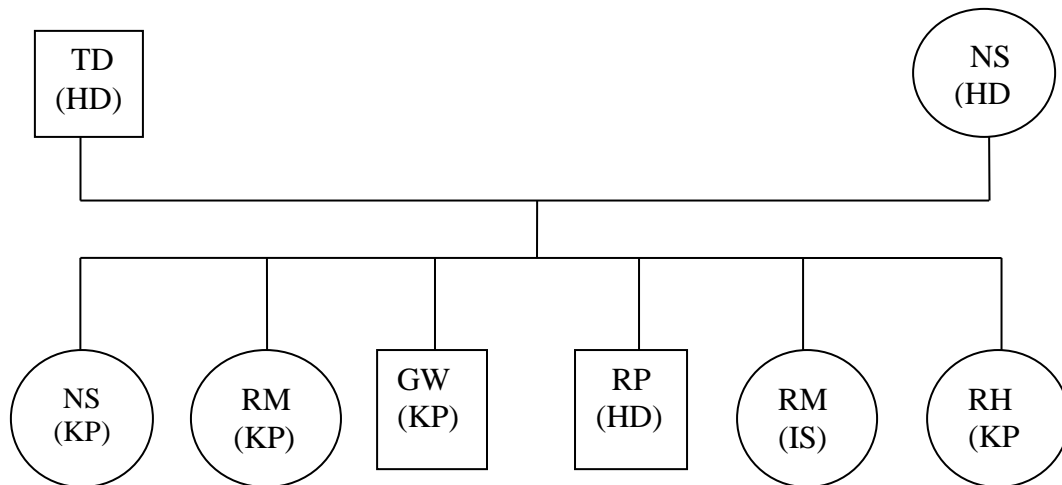
Pada tahun 1999 MB (suami) meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan yaitu enam orang anak dan satu orang istri.

Responden V

a. Identitas Responden

Nama RM, umur 54 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, status dalam keluarga adalah anak kelima dari enam bersaudara, alamat Jalan Pelita Raya Gang Beringin Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian Responden



Keterangan Gambar :

HD = Hindu

KP = Kristen Protestan

IS = Islam

NS = Norsida

RM = Rusmiati

GW = Gunawan

RP = Rupawan

RM = Rusmanani

RH = Rusmahena

RM adalah anak kelima dari pasangan TD (suami) dan NS (istri). RM mempunyai lima orang saudara yaitu dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Saudaranya adalah NS anak pertama berjenis kelamin perempuan, RM anak kedua berjenis kelamin perempuan, GW dan RP anak keempat dan kelima berjenis kelamin laki-laki dan RH anak keenam berjenis kelamin perempuan.

Pada mulanya seluruh keluarga ini beragama Hindu Kaharingan, akan tetapi karena NS, RM, GW dan RH menikah dengan pasangan masing-masing yang beragama Kristen Protestan. Sedangkan RP tetap menganut agama Hindu dan RM menganut agama Islam karena menikah dengan laki-laki Muslim. Akhirnya terjadilah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Pada tahun 2009 TD meninggal dunia di desa Kalahien sedangkan istrinya telah meninggal dunia lebih dahulu. Ia meninggalkan harta warisan kepada ahli waris yang terdiri atas empat orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki.

3. Penyajian Data

- a. Proses pembagian waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan

Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan

1. Keluarga NL (Responden I)

Berdasarkan hasil wawancara dengan NL yang antara lain isi wawancaranya adalah :

Sebelum abah meninggal pada tahun 2018 mama sudah meninggal duluan. Kami anak-anaknya sebanyak delapan delapan orang, empat laki-laki dan empat binian. Kami terpencar-pencar, ada yang badiam di Buntok, di Palangka dan di Banjar. Sebenarnya kami kada terlalu memikirkan harta warisan karena sudah pada mandiri barataan. Tapi karena ini harus dilaksanakan, maka olek kakak laki-laki tertua bermusyawarah lawan kami untuk pembagian warisan kemudian mengundang Damang sebagai saksi. Sebujujny harta yang dibagi tu kada banyak, hanya uang seratus juta rupiah dan satu buah rumah kemudian disepakati rumah di jual harga seratus juta. Jadi jumlah harta dua ratus juta rupiah dan akhirnya dibagi rata masing-masing dua puluh lima ribu rupiah. Kami semuanya tetap patuh pada aturan adat yand ada.¹⁰⁶

Setelah menyimak hasil wawancara di atas maka diperoleh informasi bahwa pada tahun 2018 EN meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan yaitu delapan orang anak, sedangkan isterinya terlebih dahulu meninggal dunia. Hartawaris yang ditinggalkan adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 dan 1 buah rumah beserta isinya. Kemudian rumah tersebut di jual dengan harga Rp. 100.000.000. Jadi jumlah harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sebesar Rp. 200.000.000. Kurang lebih satu bulan setelah pewaris meninggal dunia, pembagian harta warisan dilakukan dengan dihadiri oleh keluarga terdekat dan tokoh adat setempat, pembagian dilakukan secara hukum adat. Hukum adat menentukan bahwa yang berhak membagikan harta warisan adalah anak laki-laki tertua. Setelah dilakukan pembagian dan disepakati oleh keluarga, maka bagian masing-masing ahli waris adalah HHS mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000, MD mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000, AR mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000, AT mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000, NL mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000, TH mendapatkan bagian sebesar

¹⁰⁶Wawancara dengan Norlaili, Kelurahan Hilir Siper Kecamatan Dusun Selatan , 23 Juli 2020

Rp. 25.000.000, DW mendapatkan bagian sebesar Rp. 25.000.000 dan RD mendapatkan bagian uang sebesar Rp 25.000.000.¹⁰⁷

Pembagian waris yang terjadi pada responden ketiga ini adalah dilakukan oleh anak laki-laki tertua dan dihadiri oleh tokoh adat setempat yakni Damang Kepala Adat.. Seluruh ahli waris tidak mempermasalahkan adanya diantara ahli waris yang berbeda agama, karena demi untuk menjaga agar seluruh ahli waris tetap rukun dan harmonis maka dilakukan pembagian waris dengan bagian masing-masing sama besar.

Jadi proses pembagian waris yang terjadi pada responden kesatu ini adalah dilakukan berdasarkan hukum adat yang terlepas dari ketentuan hukum agama. Keberadaan tokoh adat dalam proses pembagian waris pada responden ketiga sangat diharapkan karena disamping sebagai tokoh juga sekaligus dapat memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari pembagian waris beda agama ini, sehingga dapat difahami oleh masing-masing ahli waris bahwa kerukunan dan keharmonisan keluarga merupakan hal utama dalam kehidupan.

2. Keluarga MS (Responden II)

Berdasarkan hasil wawancara dengan MS, diperoleh informasi sebagai berikut :

Tahun 2015 abah kami JM meninggal dunia sedangkan mama sudah meninggal duluan, sidin meninggalkan kami anaknya tujuh orang. Harta yang ditinggalkan abah sebuah rumah lawan tanah tujuh hektar. Tiga bulan sesudah abah meninggal warisan dibagi setelah kami musyawarah dan dibagi pakai hukum adat, harta warisan di bagi rata oleh kakak laki-laki tertua kami kecualai saudara kami yang bernama SW mendapatkan

¹⁰⁷ *Ibid.*

satu buah rumah. Pada saat pembagian Damang, di undang dan kalau kada ada Damang diundang Mantir adatny.¹⁰⁸

ahli waris yang ditinggalkan yaitu tujuh orang anak sedangkan istri sudah almarhumah. Harta yang ditinggalkan ada satu buah rumah dan tujuh hektar tanah. Setelah menyelesaikan pengurusan jenazah dan upacara adat lainnya, maka tiga bulan kemudian dilakukanlah pembagian warisan. Pembagian warisan dilakukan dengan ketentuan hukum adat, yaitu anak laki-laki tertua yang memimpin pembagian warisan, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak membedakan agama yang dianut oleh para ahli waris, dan dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dan dihadiri oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan. Setelah mendapatkan kesepakatan maka bagian masing-masing ahli waris yaitu KR mendapatkan tanah seluas 1 hektar, EW mendapatkan tanah kebun seluas 1 hektar, MR mendapatkan tanah seluas 1 hektar, DL mendapatkan tanah seluas 1 hektar, MS mendapatkan tanah seluas 1 hektar, SW mendapatkan satu buah rumah dan tanah seluas 1 hektar karena ia yang merawat pewaris semasa sakit hingga pewaris meninggal dunia dan SD mendapatkan tanah seluas 1 hektar.¹⁰⁹

3. Keluarga YL (Responden III)

Setelah dilakukan wawancara dengan YL, diperoleh informasi antarlain sebagai berikut :

Tepatnya tahun 2014 abah kami meninggal sedangkan mama sudah lebih duluan dari pada abah. Saya lawan saudara yang lain berjumlah enam orang. Kami tinggalnya berpencar di wilayah Kalteng, ada yang di Muara

¹⁰⁸Wawancara dengan Marisuni, Kelurahan Hilir Siper Kecamatan Dusun Selatan, 27 Juli 2020.

¹⁰⁹*Ibid.*

Teweh, Palangka dan Buntok. Kami berenam berbeda agama a yang Islam satu orang Katholik tiga orang dan Kristen Protestan dua orang. Sebelum pembagian warisan kakak laki-laki tertua kami mengumpulkan kami lawan mengundang Damang untuk ikut musyawarah membicarakan pembagian warisan lalu disepakati agar harta warisan abah dibagi rata saja. Harta yang dibagi berupa kebun karet dan rotan seluas enam hektar. Masing-masing mendapat satu lembar. Di bagi secara hukum adat.¹¹⁰

Setelah mendapatkan informasi dari sebagian hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa harta yang dibagi kepada ahli waris adalah berupa kebun karet dan rotan seluas enam hektarserta uang sebesar Rp. 30.000.000,-. Setelah keperluan mengurus jenazah diselesaikan, maka dua bulan kemudian dilakukanlah pembagian hartawarisan berdasarkan hukum adat. Pembagian harta warisan dihadiri oleh seluruh keluarga pewaris dan keluarga terdekat dengan mendengarkan petunjuk dari Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan. Setelah musyawarah pembagian dilakukan, maka disepakatilah bagian masing-masing ahli waris yaitu Rusmiah, Yunio, Liwardi, Ningsih, Yulisa dan Sidharta masing-masing mendapatkan satu hektar tanah dan uang sebesar Rp. 5.000.000,-

.¹¹¹

4. Keluarga TPW (Responden IV)

Berdasarkan hasil wawancara dengan TPW, maka diperoleh informasi sebagai berikut :

Bapak kami meninggal tahun 1999, meninggalkan mama dan kami enam bersaudara di antaranya ada yang agama Kristen Protestan empat orang lawan agama Hindu satu orang lawan agama Islam satu orang, Harta yang ditinggalkan abah kami berupa enam hektar tanah lawan satu buah hotel. Setelah dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh semua ahli waris lawan Damang akhirnya disepakati bahwa tanah dibagi rata masing-masing satu

¹¹⁰Wawancara dengan Yulisa, di Kelurahan Hilir Sper tanggal 29 Juli 2020

¹¹¹*Ibid.*

hektar terkecuali hotel diperuntukkan kesan mama dan sebagai tempat untuk kumpul-kumpul keluarga.¹¹²

Setelah memperhatikan hasil wawancara di atas, maka diperoleh informasi bahwa harta pewaris yang ditinggalkan adalah berupa enam hektar tanah lahan kosong dan kebun dan satu buah Hotel. Lebih kurang satu bulan pewaris meninggal, maka dilakukanlah pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan dihadiri utusan dari Maantir Adat dan atau Damang Kepala Adat. Pembagian dilakukan dengan menggunakan hukum adat. Hukum adat menentukan bahwa yang berhak memimpin pembagian warisan adalah anaklaki-laki tertua, sedangkan cara pembagiannya tidak membedakan laki-laki maupun perempuan dan tidak membedakan keyakinan atau agama pewaris dan ahli waris dengan menggunakan asas hukum adat yaitu musyawarah, mufakat, kebersamaan dan persamaan hak serta mengutamakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat sebagaimana falsafah "*huma betang*" hidup rukun dalam sebuah rumah yang terhimpun dari keluarga-keluarga besar suku Dayak.

Bagian masing-masing harta warisan adalah TPW mendapatkan satu hektar lahan kosong, YVJ mendapat satu hektar kebun karet, RT mendapat satu hektar lahan kosong, YP mendapat bagian satu hektar lahan karet, LM mendapatkan bagian satu hektar lahan kosong dan TS mendapatkan bagian satu hektar kebun

¹¹²Wawancara dengan ibu Tri Prayawati W di Buntok Kecamatan Dusun Selatan pada tanggal 15 Agustus 2020.

karet. Sedangkan istri yaitu KRD mendapat bagian satu buah hotel sekaligus untuk rumah tempat tinggal.¹¹³

5. Keluarga RM (Responden V)

Berdasarkan hasil wawancara dengan RM, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Persisnya tahun 2009 bapak kami meninggal dunia, meninggalkan enam orang anak sedangkan mama telah lebih duluan meninggal dunia. Sesuai hukum adat kami bahwa kalau abah sudah meninggal maka kakak laki-laki tertua yang akan membagikan harta warisan. Tapi sebelum dibagi kami diajak bermusyawarah dahulu dan bersepakat bahwa harta dibagi rata terkecuali rumah diberikan kepada kakak perempuan nomor dua sebab belum punya rumah dan merawat abah ketika sakit sampai abah meninggal.¹¹⁴

Setelah mendapatkan hasil wawancara di atas, maka diperoleh informasi bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh TD terdiri dari sebuah rumah tempat tinggal dan tanah perkebunan seluas enam hektar. Pembagian harta warisan dilakukan oleh GW selaku anak laki-laki tertua kepada seluruh anggota keluarga dan dihadiri oleh Damang Kepala Adat.

Pembagian dilakukan sama, dengan tidak membedakan laki-laki maupun perempuan dan tidak memperlakukan perbedaan keyakinan atau agama pewaris dan ahli waris dengan menggunakan asas hukum adat yaitu musyawarah, mufakat, kebersamaan dan persamaan hak serta mengutamakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Wawancara dengan ibu Rusmanani di Buntok Kecamatan Dusun Selatan pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 13.00 WIB.

Adapun bagian harta warisan masing-masing adalah Norsida mendapatkan satu hektar tanah kebun, Rusmiati mendapat satu hektar kebun karet dan satu buah rumah karena belum punya rumah, Gunawan mendapat satu hektar lahan sawah, Rupawan mendapat bagian satu hektar lahan sawah, Rusmanani mendapatkan bagian satu hektar kebun karet dan Rusmahena mendapatkan bagian satu hektar kebun karet.¹¹⁵

- b. Peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan

Adapun yang peneliti jadikan informan dalam menggali informasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mantir Adat RI (Informan I)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mantir Adat Desa Kalahien,

Peneliti mendapatkan informasi sebagai berikut :

Bisa para pihak dari keluarga atau salah satu pihak dari keluarga atau orang yang dipercaya oleh pihak keluarga yang memiliki pengaruh dari keluarga atau kerabat sendiri. Yang menjadi latar belakang adalah kebiasaan leluhur sejak zaman dahulu secara turun temurun sampai dengan sekarang. Kebiasaan adat ini tidak kami biarkan sirna karena merupakan rohnya kehidupan kami sekaligus juga sebagai ajang untuk menjaga keutuhan keluarga meskipun berbeda agama. Karena yang berlaku pada adat kami pembagian waris bisa dilakukan setelah orang tua meninggal dunia. Proses pembagian waris semua keluarga berkumpul untuk bermusyawarah untuk menyepakati bagian masing-masing. Sebelum Pembagian Mantir Adat memberikan pemahaman agar kalau warisan yang sudah dibagi jangan ada yang menuntut lagi. Bagian masing-masing dibagi sama rata. Tidak ada ketentuan yang baku semuanya dibagi rata. Yang berhak menerima warisan adalah keturunannya atau anak-anak kandungnya.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Wawancara dengan Rively Igok, Mantir Adat Desa Kalahien sebagai informan tanggal 6 Juli 2020 di rumah

2) Mantir Adat UN (Informan II)

Setelah berwawancara dengan Mantir Adat Kelurahan Hilir Sper dan Kelurahan Buntok Kota, maka peneliti memperoleh informasi sebagai berikut :

Mereka ahli warislah yang bermohon, kemudian kami hadir untuk menyaksikan sekaligus sebagai mediator. Disamping seluruh ahli waris, hadir juga mantir adat dan Damang Kepala Adat juga seluruh kerabat dari kedua belah pihak yang disebut dengan ASBAH. lalu dibagi sama rata, tanpa mempermasalahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan dan agama yang di anut. Menjadi mediator ketika ada terjadi permasalahan di dalam pemahaman tentang pembagian warisan. Ahli waris sangat menghargai pada Mantir Adat dan Damang Kepala Adat untuk membantu memberikan pemahaman agar dikemudian hari tidak mempermasalahkan harta warisan yang telah dibagi secara merata padasemua ahli waris. Kalau solusi tidak ada, yang ada adalah sanksi berupa dikucilkan dari keluarga dan dicoret dari daftar keluarga. Eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Aturan yang dipakai adalah aturan secara adat yang telah turun temurun yang berlaku dimasyarakat. Sangat kuat sekali, terbukti masyarakat lebih menghargai apa yang ditentukan oleh adat ketimbang ketentuan yang ada dalam agama. Ada, yaitu berupa sanksi sosial, dikucilkan dari keluarga dan dicoret dari persaudaraan.¹¹⁷

3) Damang Kepala Adat AR (Informan III)

Setelah melakukan wawancara dengan Damang Kepala Adat, maka peneliti memperoleh informasi

Bermohon atau tidak bermohon itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan merupakan tradisi suku Dayak di daerah Dusun Selatan. Segala harta milik orang tua dibagikan kepada anak-anaknya sebagai warisan. Suku Dayak mengakui bahwa pembagian waris adalah sah dan dipegang erat oleh orang-orang suku Dayak. Pembagian warisan dilakukan oleh anak laki-laki pertama dari mereka bersaudara, dihadiri oleh para keluarga yang disebut dengan ASBAH yaitu saudara sepupu sekali, sepupu dua kali dan juga para tokoh adat seperti Mantir dan Damang. Prosesnya semua ahli waris diundang untuk duduk bersama bermusyawarah untuk mufakat kemudian dari hasil musyawarah baru dilakukan pembagian warisan. Harta warisan dibagi rata dan tidak membedakan anantara anak laki-laki dengan perempuan juga masalah beda

¹¹⁷ Wawancara dengan Unda, Mantir Adat Kelurahan Hilir Sper dan Kelurahan Buntok Kota sebagai informan tanggal 7 Juli 2020 di rumah Kelurahan Buntok Kota.

agama. Yang berhak menerima warisan adalah ana-anak kandung sesuai dengan aturan adat yang sudah turun temurun. Warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang lain apabila pewaris tidak punya, itu aturannya. Kalau ada ahli waris yang keberatan bisa mengajukan ketika itu juga, dia bisa menyampaikan dengan aturan adat. Tetapi kalau itu sudah dibagi dan dipegang masing-masing sanksinya besar sekali. Tidak boleh menolak lagi, tidak boleh menggugat lagi karena sanksi terakhir bagi saudara yang tidak mengikuti ketentuan pembagian secara adat itu akan dikucilkan dari keluarga, dikeluarkan dari persaudaraan. Juga mendapat sanksi social. Kalau dia menggugat dia harus membayar hukum adat dulu baru membuka gugatannya.¹¹⁸

- c. Eksistensi hukum adat dalam pembagian waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

Berdasarkan beberapa informasi yang peneliti peroleh dilapangan, bahwa hampir semua masyarakat termasuk beberapa orang yang ditokohkan memberikan apresiasi yang sama tentang eksistensi hukum adat dimasyarakat. Adapun tokoh dimaksud sebagai berikut :

1. Damang Kepala Adat (AR)

Setelah melakukan wawancara dengan informan, maka diperoleh informasi sebagai berikut :

Bahwa keberadaan hukum adat dapat mewarnai kehidupan masyarakat terutama tentang perdamaian. Masyarakat lebih mengutamakan ketentuan yang ada dalam aturan adat dari pada aturan agama, sehingga seakan-akan hukum adat adalah segalanya bagi masyarakat untuk menentukan apa-apa yang menjadi keputusan. Hukum adat dalam hal waris memiliki misi untuk kedamaian, ketentraman dan kerukunan hidup yang tidak lain akan berimbas pada kerukunan hidup beragama sesama anak bangsa agar tidak terjadi benturan budaya. Hukum adat juga memfasilitasi dimana seseorang apabila berada di wilayah ini harus mentaati hukum adat kami dan apabila tidak memberikan sanksi moral meskipun tidak tertulis tapi akan diingat selama hidup.¹¹⁹

¹¹⁸ Wawancara dengan Ardianson, SE. Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan sebagai informan tanggal 6 Juli 2020 di rumah.

¹¹⁹ Wawancara dengan Ardianson, SE. Damang Kepala Adat Dusun Selatan pada tanggal 9 Agustus 2020 pukul 11.35 sampai selesai di rumah.

2. Kasi Bimas Kristen Kemenag Kab. Barsel (TN)

Berdasarkan hasil wawancara dengan TN, peneliti memperoleh informasi sebagai berikut :

Selama saya mengamati eksistensi hukum adat di Kecamatan Dusun Selatan, khususnya di desa Kalahien dan Jutuh sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, terutama mampu meminimalisir persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat, menjadi kehidupan yang damai, rukun dan saling menghargai satu sama lainnya. Dalam hal pembagian waris hampir tidak pernah mendengar masyarakat yang mengklaim terkait pembagian waris secara hukum adat.¹²⁰

3. Penyuluh Agama Hindu Kemenag Kab. Barsel (MH)

Setelah mewawancarai MH, maka peneliti memperoleh informasi tentang eksistensi hukum adat sebagai berikut :

Sepanjang pengamatan saya selaku penyuluh agama Hindu tentang eksistensi hukum adat dalam hal pembagian waris beda agama tidak ada masalah, karena selama ini saya belum pernah mendengar ada keributan atau cekcok tentang pembagian waris beda agama di kalangan masyarakat khususnya keluarga yang berbeda agama. Hal ini menurut saya menandakan bahwa hukum adat sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat sehingga mengabaikan hukum agama yang terkadang mengikat.¹²¹

¹²⁰ Wawancara dengan bapak Tono, S.PAK, Kasi Bimas Kristen Kemenag Kab. Barsel tanggal 13 Agustus 2020 di Kantor.

¹²¹ Wawancara dengan ibu Miyah, S.Ag, Penyuluh Agama Hindu Kemenag Kab. Barsel tanggal 13 Agustus 2020 di Kantor.

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Proses Pembagian Harta Waris Keluarga Suku Dayak beda Agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

Perlu peneliti pertegas bahwa pembagian harta warisan beda agama dalam penelitian ini adalah pembagian warisan yang dilakukan oleh keluarga berbeda agama yang pewarisnya beragama non Islam. Dari semua responden yang telah peneliti lakukan yaitu responden nomor satu sampai dengan tujuh pada umumnya proses pembagian waris dilakukan berdasarkan hukum adat, yaitu diawali dengan musyawarah keluarga untuk menghindari adanya protes serta ketidakpuasan dari masing-masing ahli waris sekaligus untuk menyepakati besarnya jumlah bagian masing-masing yang didapat dengan tidak membedakan gender atau jenis kelamin maupun agama yang dianut oleh pewaris dengan ahli waris. Terhadap lima responden yang diteliti, akan dibahas satu persatu yaitu :

Terkait dengan proses pembagian waris beda agama pada lima responden di atas, akan dibahas menurut ketentuan hukum masing-masing agama, hukum Perdata dan hukum Adat, sebagai berikut :

- 1) Menurut perspektif hukum Islam bahwa seseorang yang menerima harta warisan dari orang tuanya atau kerabatnya ada dua syarat, yaitu didasarkan pada hubungan perkawinan dan didasarkan pada hubungan

kekeluargaan. Sedangkan sebab-sebab hilangnya hak kewarisan ada dua yakni disebabkan karena pembunuhan dan perbedaan/berlainan agama.¹²²

Menurut Abdul manan, sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan adalah karena kekerabatan, pernikahan dan memerdekakan budak (*al-Wala'*), sebab yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan seseorang sebagai manusia. Oleh sebab itu, ia mewarisi harta orang yang membebaskannya.

Berkaitan dengan syarat penghalang mendapatkan harta warisan yaitu perbedaan agama, seluruh ulama fiqih sepakat bahwa seorang kafir tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. Hal tersebut diungkapkan oleh Ja'far Subhani dalam kitabnya *al-I'tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah: Dirasah Mubasatah fi Masail Fiqhiyyah Muhimmah*. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apabila seorang muslim yang menerima harta warisan dari orang kafir.

Menurut para Imam Mazhab Sunni (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan begitu juga sebaliknya. Demikian yang diungkapkan Muhammad ibn Abdurrahman ad-Damsyiqi dalam kitabnya *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imah*. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima harta warisan dari orang kafir. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syi'ah, yang juga mengikutipendapatdari Ali R.A., Muazd ibn Jabal, Muawiyah ibn Abi

¹²² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2004) Cet. IV. h. 54

Sufyan, Masruq, Sa'id, Abdullah ibn Maqal, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Muhammad ibn Ali al-Baqir, dan Ishaq ibn Rahawaih. Adapun alasan mengapa mazhab tersebut mengatakan boleh karena hal tersebut tidak menambah bagi Islam kecuali keagungan, bukan kesusahan dan kecelakaan. Karenanya, tidaklah masuk akal mencegah orang muslim mewarisi harta peninggalan ayahnya atau anak-anaknya.

Menurut Imam al-Baqir dari kalangan Syi'ah mengatakan bahwa ;
 “Yahudi dan Nasrani tidak mewarisi Musliman, sedangkan muslimin mewarisi Yahudi dan Nasrani.”

Terhadap beberapa pendapat di atas telah jelas menggambarkan bahwa kedudukan perbedaan agama dalam kewarisan Islam, dalam hal seorang muslim menerima harta warisan dari non muslim masih dalam perdebatan, sebab belum ada kesepakatan para ulama terhadap hal ini. Sedangkan imam Mazhab sepakat bahwa karena berbeda agama tidak berhak atas waris. Bahkan hal ini juga ditunjukkan oleh Al-Qur'an ketika menceritakan kisah Nuh dan anaknya yang kafir pada surah Huud ayat : 45 – 46 yang berbunyi :

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ أَبْنِيَیَ مِنْ أَهْلِی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِیْنَ قَالَ یُؤُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّیْ أَعْطَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ

Artinya: Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "YaTuhanku, Sesungguhnya anakku Termasuk keluargaku, dan Sesungguhnya janji Engkau Itulah yang benar. dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman: "Hai Nuh, Sesungguhnya Dia bukanlah Termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), Sesungguhnya (perbuatan)nya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui (hakekat)nya.

Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu orang-orang yang tidak berpengetahuan.¹²³

Para ahli fiqih bersepakat bahwasanya orang-orang kafir dapat saling mewarisi satu sama lain Ketika mereka berada dalam satu kepercayaan yang sama, misalnya mereka sama-sama beragama Nasrani. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw. “Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir”.¹²⁴ Secara implisit, hadits ini memiliki arti bahwa orang-orang kafir dapat saling mewarisi satu sama lain. Demikian hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya: Hadits dari Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraiz dari Ibnu Syihab dari ‘Ali bin Husain dari ‘Amru bin ‘Utsman dari Usamah bin Zaid ra, sesungguhnya Nabi Shollallahu’alaihi wasallam bersabda : Orang Muslim tidak mewarisi dari orang Kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi dari orang Muslim” (HR. Bukhari)¹²⁵

Hadits di atas menunjukkan bahwa pemeluk satu kepercayaan dapat mewarisi satu sama lainnya. Para ulama berselisih pendapat dalam hal waris mewarisi antar sesama non muslim manakala terjadi ketidaksamaan agama (kepercayaan) mereka, seperti Yahudi dengan Nasrani atau Majusi. Perselisihan ini bermuara pada perbedaan mereka dalam memandang apakah agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan

¹²³Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 304

¹²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 1995) h. 645

¹²⁵ Achmad Sunarto, *Terjemah Shohih*, (Semarang : CV. Asy Syifa, 1993), hadits nomor 6764, Juz VIII h. 610.

tersebut dianggap sebagai satu agama atau beberapa agama yang berdiri masing-masing, dalam masalah ini ada beberapa pendapat:

- a) Pendapat kebanyakan ulama (jumhur ulama), seluruh agama atau kepercayaan selain Islam itu dianggap satu. Dengan pendapat ini, maka orang-orang kafir satu sama lain dapat saling mewarisi, baik satu agama maupun tidak, karena seluruh agama selain Islam pada dasarnya dalam kesesatan, dan agama-agama tersebut bagaikan satu agama. Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat Yunus ayat: 32

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ

Artinya: Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?

- b) Maliki dan Hambali menyebutkan: para penganut agama-agama non muslim tidak boleh mewarisi satu sama lain. Dengan demikian seorang Yahudi tidak bisa mewarisi orang non Yahudi, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan pemeluk-pemeluk agama lainnya satu sama lainnya.
- c) Imamiyah, Hanafiyah dan Syafi'i mengatakan mereka bisa saling mewarisi satu sama lain. Sebab mereka mempunyai millah yang sama. Mereka semua adalah orang-orang non muslim. Akan tetapi Imamiyah mensyaratkan bahwa kebolehan saling waris mewarisi antara mereka itu sepanjang tidak ada di antara mereka pewaris yang muslim. Kalau terdapat seorang pewaris muslim, sekalipun mempunyai ikatan kekerabatan yang jauh, dia dapat menghalangi kerabat lain untuk

memperoleh warisan, sekalipun yang disebut kelompok ini memiliki ikatan kekerabatan yang lebih dekat. Persyaratan ini tidak diterima di kalangan mazhab empat, sebab bagi mereka seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim.

d) Keputusan fatwa MUI Nomor : 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 pada Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M., setelah menimbang antara lain:

- (1) Bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama,
- (2) Bahwa sering dimunculkan pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama,
- (3) Bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama. Mengingat berdasarkan Al-Qur'an surah Firman Allah Swt:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“....Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”(Q.S. An Nisa: 141).

Hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا ابُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)

Artinya:“Menghabarkan kepada kami Abu ‘Asim dari Ibnu Juraih dari Ibnu Shihab dari ‘Ali bin Husain dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.”¹²⁶

Nabi Muhammad Saw sendiri mempraktekkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi Saw meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi Saw, harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu ‘Uqail dan Thali. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja’far oleh beliau tidak diberi bagian.

¹²⁶ Achmad Sunarto, *Terjemaah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993) Juz VIIIh. 610

e) MUI menetapkan:

- Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan Non muslim).
- Pemberian harta orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹²⁷

2) Menurut perspektif agama Kristen/ Katholik, dalam al Kitab Yesaya ayat 38 pasal 1 berbunyi :

Pada hari-hari itu Hizkia sakit hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amons dan berkata kepada nya: “Beginilah firman TUHAN sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi”.¹²⁸

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1299, pasal 1 berbunyi:

Yang dari Hukum kodrati dan hukum kanonik dapat menentukan dengan brbas penggunaan harta bendanya, dapat menyerahkan harta untuk karya-karya saleh, baik lewat hibah maupun lewat wasiat/ waris.

Menurut al Kitab Kejadian 15, pasal 2, 3 dan 4 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2:

Abram menjawab: “Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku mati dengan tidak mempunyai keturunan, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.”

¹²⁷ Sekretariat MUI, *Himpunan Keputusan Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*. h. 144-148

¹²⁸ Pemerintah RI. 1974, *Alkitab Terjemahan Baru*. Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia., h. 136.

Pasal 3: Lagi kata Abram:

Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku.”

Pasal 4:

Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, “Dia tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandung, dialah yang akan menjadi ahli warismu.”¹²⁹

Terkait pembagian warisan, dalam Taurat Perjanjian Lama orang Ahli Kitab, di dapatkan pada Kitab Bilangan mengacu pada pemindahan kepemilikan harta mayit kepada ahli waris dalam keluarga Israil, adanya keturunan laki-laki menghalangi anak perempuan mendapatkan harta waris orang tuanya. Ketika tidak ada anak laki-laki barulah harta warisan diberikan pada anak perempuan. Berikut kisah dalam Taurat.¹³⁰ Dalam Bilangan Surat 27:

Pasal 8:

Dan kepada orang Israil kamu harus berkata: Apabila seseorang meninggal dengan tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada keturunannya yang perempuan.

Pasal 9:

Apabila dia tidak mempunyai keturunan perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki.

¹²⁹Pemerintah RI, 1974, h. 55

¹³⁰<http://novitasuslapa.blogspot.com/2016/03/hukum-warisan-menurut-kristen.html>. (diakses pada 03 Juli. Pukul: 18)

Pasal 10:

Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusaknya itu kepada saudara-saudara lelaki bapaknya.

Pasal 11:

Dan apabila bapaknya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusaknya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara keluarganya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Musa.¹³¹

- 3) Menurut Perspektif hukum agama Hindu. Dalam Manawa Dharmasastra, disebutkan ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumlahan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan, dan menerima hadiah dari orang-orang saleh.¹³²

Jadi dahana adalah harta yang diperoleh sebagai pemberian berdasarkan hukum agama. Maka penghibahan adalah jenis pemberian hadiah. Dan yang dapat melakukan pemberian hadiah/hibah adalah ayah, itupun terbatas pada harta tertentu yang bukan harta pusaka milik bersama. Ibu dan anak tidak berhak memberikan harta keluarga.¹³³

¹³¹Pemerintah RI, 1974. Alkitab Terjemahan Lama. Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. Bilangan: 27. h. 162.

¹³²G Pudja dan Sudharta, Tjokorda Rai. 1973. *Manawa Dharmasastra*. Surabaya: Pramita. h. 546 .

¹³³Hilman Hadi Kusuka. 1991. *Hukum waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. (PT. Citra Aditya Bakti Bandung). h. 154.

Dasar berlakunya pewarisan dengan pembagian harta peninggalan, antara lain sebagai mana diatur dalam Manava Dharmasastra¹³⁴ adalah sebagai berikut:

- a) Setelah kematian seorang bapak, ibu, dan saudara-saudara karena setelah berkumpul, dapat membagi-bagi diantara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi orang tuanya masih ada.
- b) Atau saudara laki-laki tertua sendiri dapat menguasai semua harta orang tuanya, sedangkan anak yang lain akan hidup dibawah asuhannya seperti halnya sebagai orang tua masih ada.¹³⁵

Adapun ketentuan pembagian waris agama Hindu sebagai berikut:

- a) Hak waris anak laki-laki purusa. Anak laki-laki yang statusnya purusa dapat seluruh harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, dan mengelola sepertiga harta guna karya atau due tengah.¹³⁶
- b) Hak waris anak laki-laki bukan purusa, mendapatkan dua pertiga harta guna karya orang tua dibagi antara anak-laki dan anak perempuan, tapi bagian anak perempuan separoh bagian anak laki-laki.¹³⁷
- c) Hak Waris Perempuan Hindu. Menerima dua pertiga harta guna karya bersama anak laki-laki bukan purusa. Dan janda mendapatkan satu bagian. Jika tidak mempunyai anak laki-laki maka semua warisan jatuh

¹³⁴Ibid. h. 244.

¹³⁵G Pudja dan Sudharta, Tjokorda Rai. 1973. *Manava Darmasastra*. Surabaya: Pramita. h. 464

¹³⁶Ni Nengah Budawati, dkk. 2012. Payung Adat untuk Keluarga Bali. (Denpasar: LBH APIK Bali). h. 24

¹³⁷Ni Nengah Budawati, dkk. 2012. h. 25.

ke tangan anak perempuan. Tidak mendapatkan warisan jika bertingkah tidak baik dan meninggalkan rumah atau pindah agama.¹³⁸

4) Menurut Perspektif hukum Perdata

Kewarisan Perdata (Hukum waris Eropa) yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek atau BW adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹³⁹ Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan perdata sebagai berikut :

- a) A.Pitlo mengemukakan Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.¹⁴⁰
- b) Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁴¹
- c) Vollmar berpendapat, bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari orang yang mewariskan kepada para warisnya.¹⁴²

¹³⁸Ni Kadek Setyawati. 2017. Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. Jurnal Penelitian Agama Hindu. Bali. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Vol. 1: No. 2. h. 618.

¹³⁹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), h. 81.

¹⁴⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (PT. Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 249.

¹⁴¹A. Pitlo, *Perdata Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Belanda*, (Jakarta : Intermedia, 1986), h.1.

¹⁴²H.F.A.Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1992) h. 373.

Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan sebagaimana terbuka.

Adapun Unsur-unsur Kewarisan Perdata menurut para ahli hukum di antaranya adalah sebagai berikut :

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu sebagai berikut :

- a) Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b) Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau erfgenaam yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.

Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

Untuk terjadinya pewarisan maka pewaris harus sudah meninggal dunia, disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dapat dibedakan menjadi :

- Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki) yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah benar-benar mati.
- Mati demi hukum, dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
- Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Dalam KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan sebuah warisan dari pewaris, yaitu :

- Secara ab intestato (pewarisan menurut UU). Pewarisan menurut Undang-Undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ahli waris menurut Undang-Undang berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :
 - (a) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
 - (b) Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
 - (c) Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris.
 - (d) Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya.¹⁴³
- Secara testarmentair atau ahli waris ditunjuk dalam suatu wasiat atau testamen. Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara ab intestato.¹⁴⁴

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas yaitu :

- (a) Hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.
- (b) Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh

¹⁴³ Mukhtar Zamzami, *Perempuan & keadilan dalam hukum kewarisan Indonesia*, (Prenada Media Group, Jakarta, 2013) h. 49

¹⁴⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), h.85-86.

hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seseorang yang meninggal.

- (c) Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris.
- (d) Asas individual, yaitu ahli waris secara perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
- (e) Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu.
- (f) Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.

Terdapat sebab-sebab menurut Undang-Undang ahli waris tidak

patut atau onwaardig menerima warisan dari pewaris :

- a. Ahli waris yang menurut Undang-Undang yang dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan secara ab intestato dalam pasal 838, 839 dan 840 KUH Perdata adalah¹⁴⁵:
 - Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
 - Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
 - Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
 - Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- b. Ahli waris menurut wasiat yang dinyatakan tidak patut menerima warisan dalam pasal 912 KUH Perdata, ialah :
 - Mereka yang telah dihukum karena membunuh pewaris.
 - Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
 - Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

5) Menurut perspek Hukum Adat Dayak.

Bahwa di Indonesia selain pluralitas agama, juga yang tidak kalah pentingnya adalah keragaman tradisi. Salah satu ekspresinya ialah adat

¹⁴⁵Oemarsalim, *Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 141.

istiadat dan budaya masyarakat. Adat istiadat dan budaya merupakan khazanah sosial yang memiliki nilai positif dalam masyarakat tradisional Indonesia. Adat istiadat telah dijadikan komunikasi sosial dan sebagai perekat antar individu atau antar masyarakat adat. Untuk mengatur tata kehidupan masyarakat adat maka oleh para tokoh adat diterapkanlah hukum adat, di mana setiap daerah memiliki hukum adat sendiri-sendiri hal ini agar tidak terjadi pergeseran-pergeseran atau gesekan-gesekan yang berakibat konflik pada masyarakat baik karena agama maupun karena adat atau tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat termasuk pada masyarakat adat etnik Dayak Kalimantan Tengah baik tentang perkawinan, kewarisan, dan upacara adat lainnya .

Ada banyak konsep tentang hukum adat yang dikemukakan para ahli seperti yang dijelaskan pada bab II. Sebagian para ahli mengidentikkan hukum adat sebagai hukum yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, berkembang dalam perilaku anggota-anggota masyarakat sehari-hari. Salah satunya Ter Har menyebut hukum adat sebagai sekumpulan ide-ide normatif yang menjelma dalam keputusan para penguasa masyarakat yang dikeluarkan dalam hal terjadinya sengketa di antara anggota-anggota masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat tentang pembagian warisan.

Dalam kewarisan adat prinsip keseimbangan dan harmoni secara jelas terefleksikan. Hukum adat kewarisan merefleksikan prinsip-prinsip kehidupan yang muncul dari pemikiran komunal berdasarkan musyawarah

kekeluargaan, dimana keluarga menjadi komponen inti dalam masyarakat. Mekanisme dari hukum kewarisan adat tidak melibatkan perhitungan teknis dan matematis yang sangat rumit dalam hal pembagian harta warisan. Semua ahli waris pada intinya akan menerima bagian yang sama tanpa ada perbedaan karena factor jender, agama, umur ataupun lainnya. Sepanjang mereka masih berasal dari satu rangkaian genealogis yang sama.¹⁴⁶

Keadilan social diantara para keluarga menjadi tujuan utama dari hukum waris adat karena setiap waktu pembagian harta pertimbangan utamanya bukan pada penyegeraan pembagian harta itu tetapi bagaimana harta itu dapat dibagikan secara maksimal memberi keuntungan kepada seluruh anggota keluarga dengan merata.¹⁴⁷ Hal ini sesuai dengan beberapa data pada penelitian di atas dimana hukum adat tidak memandang adanya perbedaan dalam pembagian warisan baik perbedaan suku, agama, ras, jender dan lainnya serta tidak menggunakan perhitungan yang rumit tetapi semua ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Kewarisan hukum Islam dan kewarisan hukum adat, termasuk hukum adat Dayak mempunyai prinsip-prinsip pembagian warisan yang tidak sama. Sejarah dan kultur masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah khususnya suku Dayak di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan tidak terlepas dari tata cara/kebiasaan yang telah ada dari jaman kejaman yang hakikatnya mengikat dan sudah diterapkan sejak zaman dahulu. Masyarakat

¹⁴⁶ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008) h. 43

¹⁴⁷ *Ibid.* h. 44

Adat Kalimantan Tengah identic dengan suku Dayak yang mendominasi pulau Borneo yang terbagi dalam rumpun-rumpun atau sub suku yang tergolong dalam sebutan Dayak Besar (persamaan bahasa dan kemiripan cara hidup yang berlaku dalam satu Kawasan tiap DAS). Karena persamaan dan kebiasaan yang mengatur semua aspek social dalam tata ruang sepanjang aliran sungai yang ada dalam wilayah hukum administrasi pemerintah propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Mei sampai 24 Juli 1894 yang dihadiri para utusan 400 kelompok suku Dayak dari seluruh suku di Kalimantan/di bawah satu atap (rapat DAMAI yang merintis semangat persatuan dan pembaharuan total yang meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan. Yang merupakan tonggak lahirnya perjuangan persatuan masyarakat Dayak dalam menentang penjajahan) yang dilakukan di Kahayan Hulu Utara desa Tumbang Anoi diadakan kongres Damang se Kalimantan yang dikenal sebagai Aturan Hurung Anoi Kahayan di mana saat itu para Damang Temanggung Mantir Balian dan tokoh-tokoh Adat di pelosok pulau Kalimantan yang diprakarsai oleh Damang Batu untuk menyatukan persepsi perjuangan rakyat dalam melawan politik adu domba Belanda saat itu.

Hasil kongres saat itu menghasilkan beberapa pokok kesepakatan. Diantaranya tidaklah salah apabila propinsi Kalimantan Tengah, dapat disebut sebagai miniature kebhinekaan Indonesia. Mereka berbeda-beda tetapi tetap satu dalam semangat "*Bumi Tambun Bungai*". Demikian pula dari segi agama, masing-masing warga hidup damai dan toleran walau menganut

agama yang berbeda-beda. Semua agama hidup subur dan damai di Kalimantan Tengah, termasuk agama kaharingan yang merupakan warisan leluhur suku Dayak Kalimantan.

Dari segisosial budaya, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah mempunyai sifat keterbukaan dan jiwa toleransi yang tinggi. Karakter ini tercermin dalam falsafah “*Huma Betang*”, di mana dalam sebuah rumah besar adat tinggal Bersama sejumlah keluarga dengan segala perbedaannya: status sosial, ekonomi maupun agama.

Namun sebagai satu komunitas, mereka tetap hidup rukun, harmonis, toleran dan kooperatif. Sifat gotong royong masyarakat suku Dayak masih tetap terpelihara sampai kini terutama terlihat dalam gerak hidupnya bermasyarakat. Tercermin misalnya dalam tradisi kerja “*Habaring*”, “*Hurung*”, “*Handep*”, dan “*Harubuh*”.

Sementara seni suara berupa lagu-lagu daerah dikenal dengan istilah Karungut, Kandan, Parung, Karinci dan lain-lain. Kalimantan Tengah juga kaya dengan berbagai jenis upacara adat seperti *Manyanggar Lewu* (bersih desa), *Mampakanan Sahur Parapah*, *Mahaga Lewu* (manjaga banua), *Tiwah* yang merupakan upacara ritual agama Kaharingan yaitu mengantarkan arwah orang yang telah meninggal ke *Lewu Tatau* (sorga), pada adat Dayak Barito juga disebut adat *Wara*. Acara ini memakan waktu yang cukup lama sampai satu bulan atau lebih. Pada masyarakat Dayak juga dikenal berbagai permainan tradisional yang dilestarikan hingga saat ini seperti *balogo*, *mangacal lauk*, *meneweng* dan lain-lain.

Dalam hal pembagian warisan suku Dayak. Tiga hal yang berkaitan dengan masalah kewarisan:

- a) Ahli waris, ialah orang yang berhak menerima harta warisan.
- b) Pewaris ialah orang yang memiliki harta benda tersebut.
- c) Warisan ialah harta benda yang ditinggalkan

Urutan penerima waris menurut tradisi Dayak ialah isteri, anak, cucu, anak angkat, saudara kandung, baru kemudian saudara ibu atau saudara bapak. Jenis kelamin tidak dibedakan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Dan yang terpenting pembagian waris diatur oleh anak laki-laki tertua pewaris.

Apabila meninggal tidak mempunyai anak, maka warisnya diserahkan kepada jandanya dan bagian lain diserahkan kepada orang tua atau saudara kandungnya. Akhir-akhir ini ada semacam perjanjian dalam perkawinan yang menegaskan bahwa apabila tidak punya anak, harta warisan diserahkan kepada janda atau dudanya. Apabila ada anak angkat, maka harta warisan itu jatuh kepada anak angkatnya.¹⁴⁸

Hak dan kedudukan janda menurut hukum waris adat suku Dayak adalah bahwa janda diakui sebagai ahli waris, namun harta warisan suaminya tidak boleh dikuasai sendiri tetapi dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama (para janda dan anak-anaknya), Baik isteri pertama maupun isteri kedua kedudukannya sama sebagai ahli waris atas harta peninggalan suaminya. Namun isteri pertama biasanya lebih dihormati dalam keluarga,

¹⁴⁸ Tjilik Riwut, *Maneser Daratan Tata Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur*, (Palangka Raya: Pusakalima, 2003) h. 233-234

seperti masalah-masalah keluarga terlebih dahulu dimintakan pendapat isteri tertua. Apabila janda tersebut kawin lagi baik dengan kerabat sendiri maupun dengan orang luar suku maka kedudukannya sebagai ahli waris dicabut.¹⁴⁹

Demikian pula dengan hak dan kedudukan anak-anak dalam hukum waris adat suku Dayak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama hak dan kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tuanya. Hal tersebut juga berlaku baik terhadap anak-anak dari isteri pertama maupun anak-anak dari isteri kedua. Namun biasanya anak sulung laki-laki dipilih sebagai tungku tubing yang bertanggungjawab mengurus, menjamin dan memimpin pembagian harta warisan sedangkan anak sulung perempuan bertanggungjawab mengurus dan memelihara serta merawat kehidupan orang tuanya sampai wafat.¹⁵⁰

Di dalam hukum adat Dayak Kalimantan khususnya di Kecamatan Dusun Selatan, perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris tidak merupakan masalah atau penghalang seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Sebagaimana menurut Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Dusun Selatan mengatakan:

Apabila ada seseorang yang meninggal, maka harta jatuh kepada anaknya. Dan diatur oleh ibu, begitu juga sebaliknya apabila meninggal itu adalah ibu, maka bapaknya yang mengatur. Misalnya, semuanya maka semua mutlak kepada anak. Jadi anak mewarisi, mengurus perawatan sampai pemakaman selesai. Mengenai pewarisan tidak ada beda, sama misalnya beda agama, yang Islam misalnya orang tuanya beragama lain dan anaknya yang sama agama itu yang memelihara. Proses pemakaman sampai selesai sesuai agama orang tuanya. Anak ahli waris terdekat, isteri, suami, saudara kandung dan

¹⁴⁹Wawancara dengan Unda, Mantir Adat Hilir Sper dan Buntok Kota sebagai informan tanggal 2 Agustus 2020 di rumah.

¹⁵⁰*Ibid*

saudara sepupu. Misalnya anak tunggal maka mutlak jatuh kepada anak walaupun berbeda agama. Sedangkan harta waris tetap jatuh kepada anak tidak marga agama tetap ahli waris. Di dalam Dayak agama tidak jadi penghalang mendapatkan warisan karena setiap anak mempunyai hak-hak yang sama mengenai pembagian harta warisan. Tetapi bisa lebih banyak, siapa yang lebih banyak pengeluaran dalam memelihara orang tua sampai pemakaman. Hukum adat Dayak berdasarkan kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, kesamaan dan kebersamaan hak. Apabila orang melanggar falsafah betang maka seseorang bisa diusir dari wilayah kedamaian.¹⁵¹

Kemudian menurut Ardianson, Damang Kepala Adat Dayak Kecamatan Dusun Selatan mengatakan:

Kewarisan adat Dayak, ahli waris adalah seluruh anak, sebelum dibagi kepada anak-anak dengan anak laki-laki tertua sebagai pengatur harta warisan yang ditinggalkan. Mengenai pembagian harta waris bisa banyak mendapatkan harta warisan atau hibah karena ahli waris tersebut memelihara orang tua walau pun berbeda agama. Dalam kewarisan Dayak tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan asalkan diatur dengan musyawarah, mufakat sehingga semua dapat merasakan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga. Kewarisan beda agama tetap mempunyai hak-hak masing-masing terhadap harta warisan, karena tanggungjawab orang tuanya. Agama tidak mengikat seseorang untuk mendapatkan warisan tetapi harta mengikat secara kekeluargaan. Walaupun agama bermacam-macamada Islam, Kristen, Hindu, Budha tetap untuk anak menjadi tanggungjawab orang tuanya, anak tetap anak dan orang tuatetap orang tua. Dalam istilah Dayak marik daya-daya artinya semua berasal dari perut ibu. Sedangkan proses pembagian tetap sama dan dipaparkan menurut musyawarah keluarga dengan didampingi oleh Dewan Adat Dayak dimana peranan musyawarah Adat sangat berperan dalam menyelesaikan setiap pembagian harta warisan.¹⁵²

Dalam hukum adat juga dikenal ada istilah agama tidak menghalangi bagian ahli waris. Berawal dari pendapat-pendapat ini peneliti menilai asas-asas dari pembagian harta waris dalam perspektif hukum adat lebih ditekankan dalam aspek kekerabatannya. Hal ini bisa dilihat begitu kuatnya aspek

¹⁵¹ Wawancara dengan Ardianson di rumah desa Kalahien, Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan tanggal 25 Agustus 2020.

¹⁵² Wawancara dengan Ardianson di rumah desa Kalahien, Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan 3 September 2020.

kekerabatan ini, mengalahkan asas-asas hukum kewarisan lain dalam pandangan hukum adat. Tidak terkecuali dalam perspektif hukum adat Dayak sebagaimana penelitian yang dilakukan peneliti dimana musyawarah Dewan Adat Dayak sangat berperan dalam penyelesaian sengketa pewarisan.

Hukum waris adat tidak memandang perbedaan agama, karena kebanyakan di dalam keluarga masyarakat adat mempunyai macam-macam agama misalnya saja Rumah Betang (*Huma Betang*) yaitu sebuah symbol masyarakat adat yang sangat mementingkan sifat kekeluargaan dan mengutamakan hidup rukun. Sebagaimana asas-asas hukum waris adat yaitu asas kebersamaan dan kesamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, serta asas musyawarah dan mufakat.

Dalam hukum adat, sengketa waris diserahkan kepada Mantir Adat atau Damang Kepala Adat, yaitu orang yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa seperti halnya mediasi atau permusyawaratan adat yang dipimpin oleh hakim adat atau Mantir Adat dan Damang setempat. Prosedur permusyawaratan adat tergantung pada kebiasaan adat yang memiliki kekhasan tersendiri.

Dengan demikian, hukum adat tidak mengenal apa yang disebut dengan pengadilan umum atau pengadilan agama, melainkan pengadilan adat dengan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang dipimpin oleh hakim adat atau sesepuh adat. Mediasi sebagaimana disebutkan di atas yaitu melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun bentuk suatu Lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi sebagai mediator.

Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak, mediator berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak guna mencari masukan mengenai pokok persoalan berdasarkan informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dan selanjutnya Menyusun langkah-langkah penyelesaian yang kemudian dapat dikomunikasikan secara kekeluargaan.¹⁵³

Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*). Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1991, ketentuan mengenai mediasi juga diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU No 30 Tahun 1999. Dari literatur hukum, Black's Law Dictionary yang dikutip oleh Ahmadi Hasan dikatakan bahwa mediasi atau mediator adalah: *Mediation is a method of non binding dispute revelation involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution*. Mediasi merupakan model penyelesaian di mana pihak luar tidak memihak atau netral (mediator) guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.¹⁵⁴

Salah satu kelemahan dalam menggunakan penyelesaian dengan hukum adat adalah prosedurnya tidak tertulis sehingga memungkinkan salah satu anggota adat tidak mengetahui bagaimana prosedur adat yang sebenarnya.

¹⁵³ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Op. Cit. h. 75

¹⁵⁴ *Ibid.* h. 74

Sebab prosedur tersebut hanya berdasarkan adat kebiasaan yang tidak tertulis. Hal yang paling menonjol apabila menggunakan hukum adat sebagai bentuk penyelesaiannya adalah kemufakatan para pihak yang bersengketa akan menjadi kaidah hukum tertinggi serta keputusan hakim adat yang memiliki wibawa dan dihormati oleh anggota adat lainnya.

Kalau dilihat dari beberapa analisis kasus di atas maka dapat dilihat bahwa pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat di kalangan etnik Dayak lebih mengutamakan pembagian dengan cara *Shuluh* atau dalam istilah lazim pada masyarakat Banjar yang ditulis Ahmadi Hasan dengan *adat badamai* dengan peranan Dewan Majlis Adat sebagai mediator yang menerapkan hukum adat tersebut. Masyarakat adat Dayak juga lebih suka menyelesaikan perkara waris di antara mereka secara kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan falsafah adat Dayak yaitu "*huma betang*" di mana dalam sebuah rumah panggung besar terdapat keluarga-keluarga besar yang hidup rukun penuh kedamaian.

Sikap masyarakat seperti itu dalam penyelesaian harta warisan dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak negatif. Positif bagi keluarga yaitu dapat mengeratkan persaudaraan di antara mereka, karena berdamai dianggap sebagai formula terbaik, sebaliknya dapat berakibat negative sekiranya masing-masing pihak merasa kurang pas dengan hukum adat sehingga akan menimbulkan keretakan hubungan kekerabatan. Masyarakat adat etnik Dayak sangat taat dan patuh terhadap hukum adat yang dipimpin oleh tokoh adat mereka, sehingga tokoh adat bagi masyarakat Dayak punya

peranan besar dalam mempengaruhi tata kehidupan masyarakatnya terutama mengenai keputusan-keputusannya dan mereka lebih mengutamakan hukum adat dalam menyelesaikan setiap permasalahan termasuk masalah pembagian warisan yaitu mencari jalan damai sesuai asas hukum adat musyawarah, mufakat, kebersamaan dan persamaan hak untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan ketentraman berdasarkan asas kekeluargaan.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat etnik Dayak dilakukan dengan mediasi Dewan Majelis Adat dimana setiap desa atau kelurahan ada terdapat lembaga Dewan Majelis Adat tersebut, yang mana Lembaga ini pada dasarnya sebagai mediasi yang menentukan terhadap penerapan hukum adat yang menyarankan agar bagian dari masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya secara musyawarah mufakat. Dalam lembaga Dewan Majelis Adat tersebut peranan tokoh adat atau ketua adat sangat didengar pendapatnya. Oleh karena itu, peranan tokoh adat sebagai mediasi menjadi tolak ukur mereka dalam bertindak di kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pembagian dengan cara musyawarah ini atau dengan *ishlah* prosesnya hanya menempuh satu jalan yaitu musyawarah mufakat mengutamakan jalan damai sebagaimana pada penelitian Bapak Ahmadi Hasan pada masyarakat Banjar. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri pasal 183 disebutkan bahwa para pihak ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mereka menyadari bagiannya.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) h. 158

Jadi dengan kata lain pembagian warisan dengan cara *ishlah* ini juga dibenarkan dalam syariat Islam. Hanya saja yang tidak sejalan adalah pembagian sama rata tidak membedakan agama yang dianut oleh para pewaris. Dari gambaran pembagian waris tersebut dapatlah dilihat bagaimana hubungan hukum adat dengan hukum Islam pada masyarakat etnik Dayak. Sebagaimana diketahui teori pada bab II yang menjelaskan hubungan antara keduanya terdapat tiga teori yang saling bertentangan, yaitu *teori reception in complexu* dan *receptietheorie* serta *reception a contrario*. Sebagaimana diketahui bahwa teori *reception in complex* menyatakan bahwa orang Islam telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhan sebagai satu kesatuan, dan *receptietheorie* menyatakan bagi orang Islam yang berlaku bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Walaupun ada pengaruh hukum Islam tetapi ia baru dianggap sebagai hukum kalau diterima oleh hukum adat. Serta teori *reception a contrario* menyatakan bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hukum adat baru berlaku kalau diterima oleh hukum Islam (tidak bertentangan dengan hukum Islam).¹⁵⁶

Dengan melihat ketiga kategori tersebut, bilamana dikaitkan dengan pembagian waris beda agama pada masyarakat etnik Dayak dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a) Masyarakat Dayak melakukan pembagian warisan beda agama menggunakan hukum adat;

¹⁵⁶*Ibid.* h. 240

- b) Di samping menggunakan hukum adat masyarakat etnik Dayak juga menggunakan Lembaga mediasi islah melalui lembaga Dewan Majelis Adat yang punya peran penting dalam menentukan pembagian warisan;
- c) Lembaga Dewan Majelis Adat Dayak merupakan lembaga yang hidup dalam masyarakat Dayak dan dibentuk oleh masyarakat sendiri;

Lembaga adat Dewan Majelis Adat diakui oleh pemerintah melalui Perda Kedamangan dari tingkat propinsi hingga ketingkat Kabupaten.

Dalam masyarakat adat Dayak, kalua ada harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia, tetapi tidak ada orang yang menjadi ahli warisnya, maka harta dimaksud disebut harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu musyawarah atau perintah siapapun, balai harta peninggalan (dalam hukum waris Islam disebut Baitul Mal) wajib mengurus harta peninggalan tersebut, dalam adat dinamakan Balai Basarah Adat.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Balai Adat dalam tugasnya mengurus harta-harta warisan yang tidak terurus meliputi beberapa hal sebaagai berikut:

- a) Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang.
- b) Wajib membereskan harta warisan dalam arti melakukan penagihan piutang-piutang pewaris dan membayar semua utang pewaris, apabila diminta, Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban.

c) Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya.

Dalam kebiasaan masyarakat suku Dayak di Kalimantan, para ahli waris mempunyai kewajiban membayar hutang pewaris, asal saja penagih itu memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut. Demikian juga kewajiban untuk menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkannya adalah demikian penting, sehingga seorang ahli waris dengan tidak setahu waris-ahli waris lainnya boleh menjual Sebagian harta peninggalan untuk membiayai penguburan tersebut.¹⁵⁷

Selain dari kewajiban di atas, terdapat kewajiban lain, yaitu menyelenggarakan upacara atau selamatan (*sedekahan/arwahan*) atau upacara adat lainnya dalam memperingati meninggalnya pewaris. Malahan dalam masyarakat suku Dayak terdapat tradisi untuk mengadakan selamatan (*sedekahan*) yang dimulai dari tiga hari setelah wafatnya, tujuh hari, dua puluh lima hari (*manyalawi*), empat puluh hari (*matang puluh*), seratus hari (*manyaratus*), setahun (*mahaul*), dan seribu hari. Terdapat juga kecenderungan untuk memperingati hari meninggalnya seseorang pada tiap tahun (*hulan*) seperti yang juga terdapat pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Sehingga ada upacara dari masyarakat tidak memperingati ulang tahun dari mereka yang hidup akan tetapi memperingati ulang tahun dari hari meninggalnya seseorang.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press tahun 2010) , h. 276

¹⁵⁸ *Ibid*

Bahkan dalam hal memperingati seratus hari meninggalnya seseorang, pada masyarakat suku Dayak khususnya Dayak Bakumpai diadakan acara besar-besaran dengan mengundang masyarakat sekitar layaknya seperti pesta perkawinan dengan menghabiskan biaya yang cukup besar. Pada umumnya biaya-biaya untuk mengadakan selamatan atau sedekahan tersebut ditanggung oleh ahli waris yang menguras cukup besar dana untuk upacara tersebut.¹⁵⁹ Namun menurut tokoh adat Dayak Bakumpai bahwa itu merupakan adat yang tidak bisa ditinggalkan oleh pewaris sejak zaman dahulu.

Baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum adat, terlebih hukum adat Dayak, peneliti berpendapat kewarisan beda agama menurut keduanya memiliki sisi kesamaan dari segi arti waris dan barang yang diwariskan adalah harta meskipun di dalam hukum adat khususnya adat Dayak ada juga warisan berupa bukan berbentuk benda seperti warisan gelar atau nama yang dianggap punya pengaruh di masyarakat. Tetapi, diantara keduanya jauh berbeda dalam tata aturan pembagian harta warisan, apalagi tentang kewarisan beda agama sangat jauh berbeda. Adapun persamaan yang ada antara perspektif hukum Islam dan perspektif hukum adat Dayak menurut peneliti yaitu:

- a) Dalam perspektif hukum Islam, yang dijadikan obyek waris (rukun waris) adalah harta yang diwariskan oleh yang meninggal. Harta (budel pusaka atau tirkah) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris dalam bentuk benda atau hak yang dapat diwarisi. Tidak jauh berbeda dengan Islam,

¹⁵⁹ *Ibid.* h. 277

waris dalam perspektif hukum adat Dayak pun demikian, yaitu harta merupakan aspek penting dalam hal hukum kewarisan. Bahkan kalau peneliti lihat, di setiap hukum kewarisan yang ada di seluruh Nusantara (bahkan dunia), hukum kewarisan tidak dapat dilakukan tanpa adanya harta.

- b) Baik menurut perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum adat Dayak, keduanya mempunyai prinsip kewarisan yang digunakan. Bahkan cenderung keduanya mempunyai kesamaan, dari syarat menerima warisan misalnya karena kekerabatan.
- c) Salah satu pendapat di kalangan hukum Islam memandang bahwa perbedaan agama, bukan penyebab mutlak tertutupnya hak kewarisan seseorang. Bahkan menurut pendapat tersebut apabila seseorang yang non muslim meninggal dunia yang meninggalkan beberapa anak dan hanya satu anak yang muslim, maka seluruh harta yang meninggal tadi jatuh kepada anak yang muslim tersebut serta anak-anak yang lain tidak menerima apa-apa. Tidak jauh berbeda dengan perspektif hukum adat Dayak yang tidak terlalu mempersoalkan agama sebagai penghalang kewarisan.

Adapun perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat Dayak tentang kewarisannya itu diantaranya:

- a) Segala produk hukum Islam berdasarkan dua sumber utama pengambilan hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Khudari Beik dalam kitabnya mengatakan Al-Qur'an dan Hadits merupakan dalil syara' yang bersifat

Naqli. Tidak ada seorang pun yang menolak kehujjahan kedua sumber tersebut.¹⁶⁰ Berbeda dengan hukum adat, baik yang ada pada adat Dayak maupun diluarnya, yang bersumber kepada tata karma atau adat istiadat yang berlaku di daerah sebagai ciri kekhasannya. Tidak terkait dengan Al-Qur'an dan Hadits, walaupun sebagian ada yang menyandarkannya pula pada Al-Qur'an dan Hadits.

- b) Prinsip kewarisan dalam perspektif hukum Islam, terbagi atas 3 hal yaitu disebabkan karena nasab (kekerabatan), disebabkan karena pernikahan dan juga disebabkan karena perwalian (memerdekakan budak). Namun dalam system hukum adat berbeda, yakni hukum adat hanya menekankan satu aspek prinsip kewarisan saja yaitu aspek nasab (kekerabatan), Adapun aspek-aspek lain dianggap penting apabila aspek kekerabatan ini telah gugur.
- c) Dalam hukum adat, telah disepakati bahwa perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Sebab selama masih memiliki ikatan kekerabatan seseorang masih dianggap sebagai ahli waris. Sedangkan dalam hukum Islam berbeda, yaitu sebagian kalangan ulama masih menolak perbedaan agama tidak menghalangi pemberian harta waris. Adapun kalangan yang membolehkan, maka hanya sebatas harta warisan tersebut diberikan dari seorang non muslim kepada anaknya atau kerabatnya yang muslim,

¹⁶⁰ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004) h. 108

sedangkan apabila harta warisan diberikan kepada non muslim dari orang muslim, maka seluruh ulama menolaknya.

Berdasarkan perbedaan dan persamaan di atas, peneliti menilai bahwa hukum Islam tidak dapat disejajarkan dengan hukum adat. Alasannya yaitu: Pertama: bahwa hukum Islam dalam merumuskan pemecahan masalah-masalah hukum mempunyai pedoman yang kompeten yakni Al-Qur'an dan Hadits, yang seluruh umat muslim di dunia menggunakan keduanya untuk berijtihad. Sedangkan hukum adat lebih disandarkan kepada aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat tertentu, yang mungkin saja tidak dilakukan oleh adat-adat di daerah lainnya; Kedua, Hukum Islam mempunyai suatu sistem yang teratur dalam mengambil suatu produk hukum yang akan digunakan dan hal ini telah disepakati oleh seluruh kalangan ulama dalam Islam, sedangkan system pengambilan hukum dalam tatanan hukum adat, tidak konsisten sebab tiap-tiap hukum adat mempunyai karakter hukum yang berbeda-beda yang disebabkan kondisisosial yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain serta kondisi geografis yang mendukung pola hukum adat tersebut.

Walaupun demikian, bukan berarti hukum adat dalam satu kasus tidak mempunyai produk hukum yang sama dengan hukum Islam. Misalnya saja untuk huku madat Dayak dalam konteks kewarisan beda agama sangat jauh perbedaan dengan hukum Islam, karena hukum Islam jelas bersumber dari Hukum Allah SWT dan hukum adat dari kebiasaan manusia. Dalam perspektif hukum Islam telah jelas dilarang kewarisan beda agama sebagai penghalang

kewarisan secara mutlak. Sebagaimana hadits yang berbunyi: orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang muslim” sejalan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الاصل في النهي للتحريم

Artinya: *Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti haram.*

Walaupun demikian, tidak semua kedudukan larangan tersebut adalah haram, dalam kaidah ushuliyah tentang nahi yang lain, yakni:

الاصل في النهي للكراهه

Artinya: *Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti makruh*

Dari kaidah-kaidah ini peneliti dapat mengatakan bahwa hadits di atas jelas melarang secara mutlak tentang kewarisan beda agama. Dalam kaidah dasar yang lain pada kaidah fiqhiyyah juga berbunyi:

دَرْ وَأُلْمَفَا سِدِّ أَوْ لَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat.

Kaidah ini merupakan kaidah dasar oleh para ulama ushul fikih dalam merumuskan kaidah-kaidah cabang dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah. Menurut kaidah ini, segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemufsadatan, maka wajib dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam yaitu Alquran dan Hadits. Menurut peneliti, pembagian warisan dari orang non muslim kepada orang muslim, secara logika mendatangkan kemaslahatan kepada orang muslim tersebut dan mungkin saja menghindarkan dari kemufsadatan yang besar

terhadap orang muslim, tetapi secara tidak langsung kelihatan menghancurkan dan melanggar aturan Alquran dan Hadits.

Hukum Yuridis kasus waris beda agama dalam penelitian ini berlandaskan pada firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW beserta kaidah-kaidah fiqih yang menjadi rujukan utama dalam menetapkan hukum sebagai mana telah diuraikan pada bab II landasan teoritis tesis ini. Dengan demikian dasar hukum dalam waris beda agama memperhatikan juga:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019;
2. PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 yang telah menetapkan fatwa tentang Kewarisan Beda Agama yaitu:
 - a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim);
 - b. Pemberian harta antar orang yang berbedaa agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat atau hadiah.

6) Menurut Perspektif ‘Urf.

Berdasarkan kaidah ‘Urf, “bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” dan “hukum asal dalam kebiasaan atau adat istiadat adalah boleh.” Adapun ditinjau dari segi objeknya, bahwa ‘Urf yang berkaitan dengan praktek pembagian waris beda agama pada responden kesatu dan kedua ini adalah ‘*Urf Fasid*, yaitu suatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’.¹⁶¹

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan ‘*urf* shahih sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘*urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.¹⁶²

‘*Urf* shahih harus dipelihara oleh seorang Mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang Hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara’, maka wajib diperhatikan.¹⁶³ Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut :

¹⁶¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*123

¹⁶² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*212

¹⁶³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*....., 124

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum.”¹⁶⁴

‘*Urf fasid* tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.¹⁶⁵

Hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan : “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.”¹⁶⁶

Jadi dari pembahasan penelitian tentang pembagian waris beda agama pada kelima responden di atas, menurut peneliti bertentangan dengan ketentuan hukum , khususnya hukum Islam. Karena baik Al –Qur’an, Al Hadits, Ulama Fiqih maupun Ulama lainnya termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkecuali Ulama Syi’ah semuanya berpendapat bahwa

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 125

¹⁶⁶ *Ibid.*, h. 126

tidak boleh waris mewarisi antara seseorang yang berbeda agama. Jadi harta diperoleh yang di sebut warisan menurut hukum adat adalah bukan merupakan warisan melainkan berupa Hibah/ Hadiah. Adapun hal positif yang dapat diambil dari proses pembagian harta secara hukum adat adalah terwujudnya komitmen pada masing-masing ahli waris untuk tetap menjaga kerukunan, ketenteraman, kedamaian dan keharmonisan keluarga.

7. Menurut Perspektif Musyawarah

Musyawarah adalah suatu usaha bersama dengan sikap rendah hati, buat memecahkan persoalan atau jalan keluar buat bisa mengambil suatu keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan duniawi. Musyawarah mempunyai tujuan untuk bisa mencapai mufakat atau juga persetujuan.

Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah yaitu bagian dari demokrasi. Jadi, sampai saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Di Indonesia penentuan hasil itu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Kalau tidak ada jalan keluar atau mengalami kebuntuan, maka akan dilaksanakan voting atau juga pemungutan suara.

Musyawarah mempunyai tujuan diantaranya adalah untuk Mendapatkan kesepakatan bersama, jadi keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan buat melihat masalah dari berbagai sudut pandang jadi keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota musyawarah.

keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot, karena didalamnya ada pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya.

Musyawah juga memiliki beberapa ciri di antaranya adalah dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama, hasil keputusan musyawarah bisa diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan gak memberatkan anggota musyawarah, dan mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur.

Musyawah memiliki asas yang terbagi dalam 3 bagian, diantaranya adalah asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas keseimbangan mempunyai kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban, tidak mendahulukan haknya dari pada kewajiban, asas musyawarah dan mufakat dan asas kepastian hukum dan keadilan.

Musyawah memiliki beberapa manfaat, seperti melatih untuk mengemukakan pendapat, masalah bisa segera terpecahkan, keputusan yang dihasilkan memiliki nilai keadilan, hasil keputusan yang diambil mengutamakan semua pihak, dapat menyatukan pendapat yang berbeda, adanya kebersamaan, dapat mengambil kesimpulan yang benar, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan, menghindari celan dan terciptanya stabilitas emosi.

Setelah menganalisa teori tentang musyawarah di atas, peneliti berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga lima responden tidak bertentangan dengan aturan – aturan bermusyawah, baik yang

dilakukan dalam skala kecil seperti dalam rumah tangga, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara, hanya saja tetap bertentangan aturan yang ada dalam Islam yaitu orang Muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir dan begitu pula sebaliknya.

2. Peran Tokoh Adat dalam Pembagian Harta Waris Keluarga Suku

Dayak Beda Agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito

Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan maupun responden diperoleh hasil bahwa pada setiap proses pembagian warisan semuanya melibatkan Mantir Adat dan Damang Kepala Adat. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung tokoh adat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat urgen sekali. Mantir Adat dan Damang Kepala Adat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melestarikan dan mempertahankan hukum adat yang berpatokan pada asas persamaan dan kebersamaan hak yang menganjurkan bahwa hak seorang anak sebagai ahli waris mempunyai hak yang sama selama masih ada ikatan kekeluargaan khususnya ikatan darah keturunan dengan pewaris.

Ketika pada saat pembagian waris, Mantir Adat dan Damang Kepala Adat selalu diundang untuk hadir menjadi saksi sekaligus memberikan penjelasan tentang tata cara pembagian waris beda agama secara hukum adat agar semua ahli waris dapat memahami tentang hak dan bagiannya masing-masing sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah atau konflik. Peran Mantir Adat dan Damang Kepala Adat yang lebih urgen adalah apabila

terjadi konflik atau sengketa tentang warisan antara ahli waris yang satu dengan lainnya, yaitu menjadi mediator terhadap para pihak agar permasalahan yang terjadi tidak berkepanjangan hingga sampai ke Pengadilan. Sepanjang masih bisa dilakukan negosiasi tawar menawar kepada para pihak, sepanjang itu pula Mantir Adat dan Damang Kepala Adat selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak.. mediator, yakni melakukan mediasi kepada setiap ada permasalahan pada masyarakat adat terkhusus tentang pembagian waris. Dalam melakukan mediasi, sudah pasti melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun bentuk suatu Lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen dan tidak memihak, mediator berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak guna mencari masukan mengenai pokok persoalan berdasarkan informasi yang diperoleh. Kemudian mediator menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dan selanjutnya Menyusun langkah-langkah penyelesaian yang kemudian dapat dikomunikasikan secara kekeluargaan.¹⁶⁷

Sebagai tokoh adat, Mantir Adat dan Damang Kepala Adat sebagai mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi antara berbagai pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1991 tentang mediasi. Ketentuan mengenai mediasi juga diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU No 30 Tahun 1999. Dari literatur hukum, *Black's Law*

¹⁶⁷ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Op. Cit. h. 75

Dictionary yang dikutip oleh Ahmadi Hasan dikatakan bahwa mediasi atau mediator adalah:

Mediation is a method of non binding dispute revelation involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.

Mediasi merupakan model penyelesaian di mana pihak luar tidak memihak atau netral (mediator) guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.¹⁶⁸

Oleh karena itu, eksistensi tokoh adat berfungsi ganda, selain sebagai mediator juga sebagai hakim adat yang dituntut untuk memutuskan sebuah perkara agar tidak sampai kepengadilan. Akan tetapi, hakim adat biasanya memutuskan ketentuan hukum adat agar dalam masyarakat selalu damai dan tentram yaitu melalui musyawarah, mufakat, persamaan dan kebersamaan hak.

3. Eksistensi Hukum Adat Dalam Pembagian Harta Waris Keluarga Suku Dayak Beda Agama di Kecamatan Dusun Selatan

Hasil penelitian yang peneliti peroleh dari wawancara baik dengan informan maupun responden adalah bahwa hukum adat dikalangan masyarakat adat Kecamatan Dusun Selatan sangat mendominasi dalam pengaturan tata cara kehidupan masyarakat suku Dayak, sehingga mengalahkan hukum-hukum lain. Hukum adat juga menjadi pilihan utama dalam penyelesaian semua permasalahan dalam kehidupan masyarakat, dan hukum adat juga mengadopsi

¹⁶⁸ *Ibid.* h. 74

relevansi dengan ajaran agama menurut Damang Kecamatan Dusun Selatan yang menyebutkan bahwa:

Hukum adat sebagaimana ajaran-ajaran agama juga selalu mengajarkan dan menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap umat manusia. Masing-masing pemeluk agama, terutama agama misi, menawarkan keselamatan yang ia yakini kepada sebanyak mungkin manusia, termasuk kepada manusia yang telah menganut agama tertentu. Ajakan misi tersebut bukan hanya sebagai kesadaran ingin menyelamatkan manusia tetapi juga bagian dari ajaran agama tersebut, misalnya agama Kristen dengan misi penyelamatannya dan Islam dengan misi dakwahnya. Begitu juga dengan penyelesaian hukum waris kami punya misi tersendiri untuk kedamaian, ketentraman dan kerukunan hidup yang tidak lain akan berimbas pada kerukunan hidup beragama sesama anak bangsa agar tidak terjadi benturan budaya maka hukum adat memfasilitasi di mana seseorang apabila berada di wilayah ini harus mentaati hukum adat kami, kalau tidak maka kami akan memberi sanksi moral meskipun tidak tertulis tapi akan diingat selama hidupnya. Oleh karena itu hiduplah rukun dan utamakan musyawarah sebagai landasan pijakan dalam bertindak dalam menyelesaikan setiap permasalahan khususnya tentang warisan. Kita tidak mau terjadi konflik hanya karena perbedaan penafsiran dan pemahaman ajaran agama yang antara lain akan melahirkan sikap fanatisme yang berlebihan. Apalagi kalau perbedaan paham ini juga kalau dimanfaatkan terkait dengan kondisi stratifikasi sosial dan kepentingan ekonomi serta politik seperti terjadi kerusuhan di Sampit Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu.¹⁶⁹

Dari beberapa analisis di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa eksistensi hukum adat dalam mengatur masalah pembagian waris beda agama pada masyarakat suku dayak di Kecamatan Dusun Selatan adalah sebagai landasan hukum untuk dilaksanakan oleh masyarakat adat.

¹⁶⁹ Ardianson, SE, Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Wawancara pribadi dengan informan, di rumah desa Kalahien, 10 September 2020

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dilakukan dengan cara musyawarah untuk membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris. Bagian yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama, tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan dan agama yang diyakini oleh ahli waris. Ahli waris yang merawat orang tua semasa hidupnya, maka dia mendapatkan warisan yang lebih banyak dan berhak mewarisi rumah orang tua dikarenakan dia merawat orang tua sejak sakit sampai meninggal dunia.
2. Peran tokoh adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sangat dominan dengan dibuktikan bahwa pada setiap pembagian harta waris selalu diundang sebagai seorang mediator dalam pembagian warisan, dengan tetap lebih mengedepankan asas hukum adat, yaitu asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah mufakat, asas kesamaan dan kebersamaan sehingga permasalahan tidak sampai mengarah kepada gugatan ke pengadilan.
3. Eksistensi hukum adat dalam pembagian harta waris keluarga suku Dayak beda agama di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan adalah bahwa suku Dayak lebih mengutamakan hukum adat dalam pembagian harta warisan dibanding hukum agama yang dianut oleh masyarakat dengan anggapan bahwa

hukum waris adat merupakan cara pembagian yang bijaksana karena berdasarkan musyawarah dan mufakat keluarga..

B. Rekomendasi

Berpedoman dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bagi ahli waris khususnya yang beragama Islam, bahwa berdasarkan Al Qur'an dan Hadits tidak berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi hanya bisa menerima harta berupa Hibah.. Oleh sebab itu, diharapkan kepada umat Islam untuk lebih meningkatkan pemahaman agamanya khususnya tentang hukum waris.
2. Bagi masyarakat diharapkan agar tidak lagi mengistilahkan pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia.
3. Kepada Mantir Adat, Damang Kepala Adat dan masyarakat, diharapkan agar kebiasaan menyebut bagian warisan untuk ahli waris yang beragama Islam hendaknya dapat dirubah menjadi mendapatkan harta berupa Hibah/ Hadiah. Sebab Islam melarang waris mewarisi karena sebab beda agama.
4. Agar eksistensi hukum adat tetap terjaga, diharapkan seluruh masyarakat adat yang berada di Kecamatan Dusun Selatan tetap mematuhi hukum adat akan tetapi tidak boleh mengenyampingkan hukum agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: AkademikaPressindo.
- _____, 2002. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak*, Uninersitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum.
- Ali, Muhammad Daud, 2009. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. SinarGrafika.
- _____, 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: SinarGarfika.
- Al Munawar, Said Agil Husin, 2005. *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat: PT. Ciputat Press.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Ilmu Hukum Waris*, Surabaya : PT. Mutiara Ilmu.
- _____, 2005. *Hukum Kewarisan menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, Jakarta: Darl Kutub Al-Islamiyah
- Azhar Bashir, H. Ahmad, 2001. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Al-Qaradawi, Yusuf, 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- _____, *Dirasah fi Fiqh Maqasidasy-Syariah (Baina al-Maqasid al-Kulliyahwa an-Nusus al-Juz'iyah)*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto dengan judul *Fiqh Maqashid Syariah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- A.Pilto, 1986. *Perdata Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Belanda*. Jakarta: Intermasa.
- Bakar, Al Yasa Abu, 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, INIS
- Bungin, Burhan, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chulsum, Umi, Windy Novia, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Yoshiko Press

- Departemen Agama RI, 2008. *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Cahaya Qur'an
- G Pudja dan Sudharta, Tjokorda Rai, 1973. *Manava Darmasastra*. Surabaya: Pramita.
- Hasan, Ahmadi, 2009. *AdatBadamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Antasari Press.
- H.F.A. Volmar, 1992. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Hilman Hadi Kusuka, 1991. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung: PT. Aditiya Bakti.
- <http://novitasuslapa.blogspot.com/2006/03/hukum-waris-menurut-kristen-html>.(diaksespada 03 Juli. Pukul: 18)
- Ibnu al hallaj al-Qushairy an Naisabury, Abi Husain Muslim, *shahih Muslim*, Beirut: DarlFikr t.th
- KamusIlmiahPopulehLengkap*, 2010 Jakarta: PT. Gama Press
- Kompilasi Hukum Islam*, 2004 Yogyakarta, Pustaka Widyatama
- Lubis, K. Suhrawardi, Kumis Simanjuntak, 2004. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: SinarGrafika
- Lukito, Ratno, 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad al-Bukhari, Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, Beirut Darl Al Fikr, tth.
- Mukhtar Zamzami. 2013. *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nata, Abuddin, 2006. *Masail al Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana.
- Ni Nengah Budawati, dkk. 2012. *Payung Adat Untuk Keluarga Bali*. Denpasar: LBH APIK Bali.
- Ni Kadek Satyawati, 2017. *Kedudukan Perempuan Hindu Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. Bali: Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Oemar Salim, 2006. *Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah RI, 1974. *Alkitab Terjemahan Baru*. Djakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.

- Ramulyo, Idris, 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: CV. Pedomani Ilmu Jaya
- Rofiq, Ahmad, 2002. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saebani, Beni Ahmad, 2007. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sarmadi a. Sukris, 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada
- Sekretariat MUI, 2005 *Himpunan Keputusan Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Beirut, darl Fikr Juz 3, tth
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Shonhaji, H. Abdullah, 1993. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Semarang: CV. Asy Syifa
- Sunarto, Achmad, 1993. *Terjemah Shahih Bukhari*, Semarang: CV/ Asy Syifa
- Syarifuddin, Amir, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Solly Lubis, Muhammad 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Madju.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- Tjilik Riwut, 2003. *Maneser Daratan Tata Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya: Pusakalima.
- Thohir, Ajid, 2004. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Titik Triwulan Tutik, 2010. *Hukum Perdata Dalam Sistim Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Utsman, Sabian, 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Walid Muhammad, Imam Qadu Abdul, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Darl Fikr, tth
- Yasid, Abu, 2005. *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN

IDENTITAS INFORMAN:

1. Nama
2. Umur
3. Jenis Kelamin
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Pendidikan Terakhir
7. Status Dalam Keluarga

Pertanyaan:

1. Siapa yang bermohon dalam pembagian harta waris?
2. Siapa saja yang menghadiri pada saat pembagian harta waris?
3. Bagaimana cara pembagian harta waris?
4. Apa peran tokoh adat dalam pembagian harta waris?
5. Bagaimana ahli waris memposisikan tokoh adat pada saat pembagian warisan?
6. Adakah solusi dari adat terhadap ahli waris yang melanggar hasil kesepakatan?
7. Apa aturan yuridis yang digunakan dalam pembagian harta waris?
8. Seberapa kuatnya aturan yuridis itu mengikat masyarakat adat?
9. Apakah ada sanksi hukum terhadap ahli waris yang melanggar kesepakatan adat?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN

Identitas Responden:

1. Nama
2. Umur
3. Jenis Kelamin
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Pendidikan Terakhir
7. Status Dalam Keluarga

Pertanyaan:

1. Kapan pewaris meninggal dunia?
2. Berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?
3. Siapa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris?
4. Apa yang menyebabkan ahli waris berpindah agama?
5. Siapa-siapa ahli waris yang mendapatkan harta warisan?
6. Apakah ahli waris yang berbeda agama juga menerima harta warisan?
7. Siapa yang membagikan harta warisan?
8. Bagaimana tata cara pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama?
9. Menggunakan hukum apa dan seberapa kuatnya pengaruh hukum tersebut dalam pembagian warisan?
10. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

